



**PERANAN HAJI SULONG DALAM MEMPERJUANGKAN OTOMOMI
KHUSUS PATANI THAILAND SELATAN (1947- 1954)**

SKRIPSI

diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Program studi Pendidikan Sejarah, jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember, dan mencapai gelar Sarjana Pendidikan

Oleh

Husam Lamato
NIM 120210302084

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER
2016**

PERSEMBAHAN

Dengan ucapan syukur kehadiran Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda Hamidah dan Bapak Abdullah yang tidak kenal lelah dalam kasih sayang, mendidik, memberikan doa', dan memberikan motivasi selama ini;
2. Kakakku Hanan, Husna, dan Hakimah yang selalu memberikan semangat, motivasi dan selalu memberikan warna dalam kehidupanku;
3. Pendidikku: Bapak dan Ibu Guru TK Kotarano, SD Perigi, SMP dan SMA Al- Islamiyah Witthaya Mullanithi' School (Kubangbuaya), serta Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Jember;
4. Almamaterku, Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

MOTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”

(Q.S. Al-Insyirah, 94: 5-8)*



*) Departemen Agama RI. 1996. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: CV. Toha Putra.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Husam Lamato

NIM : 120210302084

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Peranan Haji Sulong dalam memperjuangkan Otomomi Khusus Patani Thailand Selatan (1947- 1954)” ini adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 13 November 2016

Yang menyatakan,

Husam Lamato

NIM 120210302084

SKRIPSI

**PERANAN HAJI SULONG DALAM MEMPERJUANGKAN OTOMOMI
KHUSUS PATANI THAILAND SELATAN (1947- 1954)**

Oleh

Husam Lamato

NIM 120210302084

Pembimbing

Dosen Pembimbing I : Drs. Sumarno, M.Pd

Dosen Pembimbing II : Dr. Nurul Umamah, M.Pd

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Peranan Haji Sulong Dalam Memperjuangkan Otomomi Khusus Patani Thailand Selatan (1947- 1954)” ini telah diuji dan disahkan oleh Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember pada :

hari, tanggal : Senin, 19 Desember 2016

tempat : Gedung I Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas
Jember

Tim Penguji

Ketua,

Sekretaris,

Drs. Sumarno, M.Pd
NIP.195204211984 03 1 002

Dr. Nurul Umamah, M.Pd
NIP. 19690204199303 2 008

Anggota I,

Anggota II,

Drs. Marjono, M.Hum
NIP. 19600422198802 1 001

Dr. Sumardi, M.Hum
NIP. 19600518198902 1 001

Mengesahkan
Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,

Prof. Drs. Dafik, M.Sc.,Ph.D
NIP. 19680802 199303 1 004

RINGKASAN

Peranan Haji Sulong dalam Memperjuangkan Otomomi Khusus Patani Thailand Selatan (1947- 1954); Husam Lamato; 120210302084; 2016 ; xiv + 63 halaman; Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Setiap negara pasti mempunyai berbagai suku bangsa, sedang Melayu adalah salah satu suku bangsa yang ada di Asia Tenggara. Melayu Patani adalah suku bangsa yang ada di Thailand Selatan. Negara Thailand selalu tidak stabil dalam hal, masalah politik dan ekonomi dengan ketidakstabilan ini, bangsa Melayu Patani yang selalu dianggap oleh pemerintahan Thailand yang menjadi penyebabnya. Masyarakat Melayu Patani sering terpinggirkan dan diskriminasi dalam beberapa aspek kehidupan seperti: sosial, politik, agama, budaya, ekonomi, dan pendidikan. Ketika masyarakat Patani sedang mengalami konflik dengan pemerintah Thai, maka muncullah seorang tokoh ulama yang terkenal yaitu Haji Sulong yang membangkitkan semangat masyarakat Melayu Patani, dalam menghadapi dasar kebudayaan ThaiRathaniyum yang diciptakan oleh Phibul Songgram, sehingga Haji Sulong terkenal, Haji Sulong dianggap sebagai Bapak Perjuangan Patani. Haji Sulong adalah termasuk golongan ulama yang terlibat dalam politik dan menentang keras terhadap campur tangan pemerintah Thai dalam urusan agama.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu: (1) apa yang melatarbelakangi perjuangan Haji Sulong dalam memperjuangkan otomomi khusus Patani Thailand Selatan (1947- 1954)?; (2) bagaimana usaha-usaha Haji Sulong dalam memperjuangkan otomomi khusus Patani Thailand Selatan (1947- 1954)?; (3) bagaimana hasil perjuangan Haji Sulong dalam memperjuangkan otomomi khusus Patani Thailand Selatan (1947- 1954)?. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah: (1) untuk mengkaji apa yang melatarbelakangi perjuangan Haji Sulong dalam memperjuangkan otomomi khusus Patani Thailand Selatan (1947- 1954); (2) untuk mengkaji bagaimana usaha-usaha Haji Sulong

dalam memperjuangkan otonomi khusus Patani Thailand Selatan (1947- 1954); (3) untuk mengkaji bagaimana hasil perjuangan Haji Sulong dalam memperjuangkan otonomi khusus Patani Thailand Selatan (1947- 1954). Metode Penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Metode Penelitian sejarah yang langkah-langkahnya adalah Heuristik, Kritik, Interpretasi, dan Histiriografi. Pendekatan yang digunakan untuk mengkaji permasalahan, yaitu pendekatan Sosiologi Politik. Teori yang dipakai dalam Penelitian ini adalah teori konflik, Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu studi perpustakaan.

Kesimpulan yang dapat diambil secara garis besar dalam penelitian ini adalah; (1) Latarbelakang perjuangan Haji Sulong dalam memperjuangkan otonomi khusus Patani disebabkan, karena adanya perbedaan agama, tradisi dan nasionalisme yang sangat jauh berbeda dengan keadaan masyarakat Melayu Patani, dan dengan adanya kebijaksanaan pemerintah Thai yang mendiskriminasikan masyarakat Melayu Patani di Thailand Selatan, baik di bidang Ekonomi, Politik, Hukum maupun di bidang Sosial Budaya. (2) Usaha Haji Sulong dalam memperjuangkan dalam memperjuangkan otonomi khusus Patani dari kebijakan kerajaan Thai yang dilaksanakan oleh Phibul Songgram melalui dasar asimilasi kebudayaan (*Rathaniyom*). Perjuangan yang dilakukan oleh Haji Sulong adalah untuk mendapatkan Otonomi Khusus yang mempertahankan identitas dan kebudayaan Melayu dengan ciri khasnya serta agama Islam sebagai agama bangsanya sendiri dari penjajah pemerintah Thai dan ini dikenal dengan Tujuh Tuntutan Haji Sulong. (3) Hasil Perjuangan Haji Sulong dalam memperjuangkan Otonomi Khusus Patani melalui Tuntutan 7 perkara tidak berhasil sehingga sampai saat Haji Sulong meninggal dunia,, Haji Sulong tidak sempat dinikmati semasa hidupnya, setelah Haji Sulong meninggal dunia, maka bangkitlah beberpa organisasi pembebasan Melayu Patani. Kemudian diteruskan oleh generasi muda Melayu Patani, namun yang paling dominan diantara organisasi itu hanya ada 3 organisasi. Adapun ketiga organisasi itu adalah: Barisan Revolusi Nasional (BRN), Patani United Leberation Organization (PULO), Barisan Nasional Pembebasan Patani (BNPP).

PRAKATA

Puji Syukur kehadirat Allah SWT. karena atas segala rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peranan Haji Sulong dalam Memperjuangkan Otomomi Khusus Patani Thailand Selatan (1947- 1954)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Drs. Moh. Hasan, M.Sc, Ph.D., selaku Rektor Universitas Jember;
2. Prof. Drs. Dafik, M.Sc.,Ph.D., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember;
3. Dr. Sukidin, M.Pd., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial;
4. Dr. Nurul Umamah, M.Pd., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah, sekaligus selaku Dosen Pembimbing II, dan Dosen Pembimbing Akademik, yang senantiasa meluangkan waktu memberikan perhatian dan bimbingannya selama masa perkuliahan dan selama penyusunan skripsi;
5. Drs. Sumarno, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan perhatian dan bimbingannya selama penyusunan skripsi;
6. Semua Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember, yang bersedia berbagi ilmu dan pengalaman;
7. Kedua orang tuaku Bapak Abdullah dan Ibu Hamidah yang tidak kenal lelah dalam kasih sayang, mendidik, memberikan doa’, dan memberikan motivasi selama ini;
8. Kakakku Hanan, Husna, Hakimah yang selalu memberikan semangat, motivasi dan warna dalam kehidupanku;
9. Adikku Hilmi, Hakimi, Humaida yang selalu memberikan warna dalam kehidupanku;

10. Isteriku Rosana yang selalu mendampingi dan memberisemangat setia waktu demi suksesan dalam kehidupanku;
11. Keluarga sekaligus teman seperjuangan 1 kelas angkatan 2012, yang telah berbagi pengalaman dalam suka maupun duka selama perkuliahan;
12. Teman-teman sebangsa dan sekeluarga besar: Himpunan Mahasiswa Patani (Thailand Selatan) di Indonesia (HMPI);
13. Serta semua pihak yang telah membantu baik tenaga maupun pikiran demi kesempurnaan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.

Jember, 13 November 2016

Penulis

DATAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DATAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAM	xiii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penegasan Pengertian Judul	7
1.3 Ruang Lingkup penelitian	8
1.4 Rumusan Masalah	9
1.5 Tujuan Penelitian	10
1.6 Manfaat Penelitian	10
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	11
BAB 3. METODE PENELITIAN	24
3.1 Heuristik	24
3.2 Kiritik	25
3.3 Intepretasi	26
3.4 Historiografi	26
BAB 4. LATAR BELAKANG PERJUANGAN HAJI SULONG DALAM MEMPERJUANGKAN OTONOMI KHUSUS PATANI	28
4.1 Riwayat Hidup Haji Sulong bin Abdul Kadir	28
4.2. Program Asimilasi dan Penghapusan Budaya Melayu	33
4.3. Dasar Phibun Songkram dan Politik Rathaniyom	35

BAB 5. USAHA-USAHA DAN PERJUANGAN HAJI SULONG DALAM	
MEMPERJUANGKAN OTONOMI KHUSUS PATANI.....	38
5.1 Pendirian Lembaga Pendidikan dan Politik	38
5.1.1 Pendirian Lembaga Pendidikan	38
5.1.2 Pendirian Lembaga Politik	40
5.2 Perjuangan Menuntut Otonomi Khusus Melalui Tuntutan 7	
 perkara	42
5.3 Reaksi Terhadap Perjuangan Haji Sulong	46
5.3.1. Tanggapan dari pemerintah.....	46
5.3.2. Tanggapan dari Masyarakat Melayu Patani.....	49
BAB 6. HASIL PERJUANGAN HAJI SULONG DALAM	
MEMPERJUANGKAN OTONOMI KHUSUS PATANI.....	52
6.1 Respon pemerintahan terhadap Tuntutan 7 Perkata.....	52
6.2 Perjuangan Rakyat Setelah Haji Sulong Wafat.....	56
6.2.1 Barisan Revolusi Nasional (BRN)	58
6.2.2 Patani United Liberation Organization (PULO)	59
6.2.3 Barisan Nasional Pembebasan Patani (BNPP)	60
6.3 Karya-karya Haji Sulong	61
BAB 7. PENUTUP.....	64
7.1 Kesimpulan	64
7.2 Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A. Matriks Penelitian.....	69
Lampiran B. Lampiran Peta.....	69
Lampiran B1. Peta Negara Thailand.....	69
Lampiran B2. Peta Kerajaan Patani Di Bawah Kekuasaan Siam.....	70
Lampiran B3. Peta Patani Setelah Perjanjian Anglo-Siam Tahun 1909.....	71
Lampiran B4. Peta Wilayah-Wilaya Islam Patani.....	72
Lampiran C. Lampiran Gambar-Gabar.....	73
Lampiran C1. Gambar Haji Sulong.....	73
Lampiran C2. Gambar Tengku Abdul Kadir Kamaruddin.....	74
Lampiran C3. Gambar Tengku Mahmud Muhaiyiddin “Harimau Malaya” Majer Fore 136.....	75
Lampiran C4. Gambar Pibun Songgram.....	76
Lampiran C5. Gambar Raja Siam “Chulalongkon(Rama V)”.....	77
Lampiran C6. Gambar Pridi Panomyong.....	78
Lampiran C7. Gambar Ahmad (atas), Encik Ishak Bin Yusoff(tengah), Wan Othman Bin Ahmad(bawah): Tewas Bersama Haji Sulong.....	79
Lampiran C8. Gambar Madrasah Al-Maarif Al-Wataniah Patani Yang Dibang Haji sulong.....	81
Lampiran C9. Gambar Haji Muhammad Aminn.....	82
Lampiran C10. Gambar Sewaktu Keluarganya Mencari Mayat Haji Sulong.....	83
Lampiran C11. . Gambar Haji Zainal Abidin (Den Tohmeena), Gambar Bangunan Majelis Agama Islam Fathoni.....	85
Lampiran D. Lampiran Dokumen.....	86
Lampiran D1. Dokumen: Tuntutan 7 Perkara	86
Lampiran D2. Dokumen: Surat Kenyataan Kehilangan Haji Sulong.....	87
Lampiran D. Biodata Peneliti.....	88

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Thailand adalah salah satu negara yang terletak di Asia Tenggara. Secara kultural, baik dari agama, bahasa dan budaya, minoritas muslim Muangthai yang tinggi di Patani (Thailand Selatan), merupakan bagian dari bangsa melayu, apalagi tempat tinggalnya secara geografis perbatasan dengan Negara Melayu Malaysia.

Namun dari segi kebudayaan, orang Melayu- Muslim di bagian Thailand Selatan itu merupakan bagian dari bangsa melayu, dari segi politik, orang Melayu-Muslim merupakan bagian dari bangsa Mungthai yang agama negaranya Buddha, sejak orang Melayu-Muslim secara langsung dimasukkan ke dalam kerajaan Thai, di bawah kekuasaan Chulalongkorn (Raja V) pada tahun 1902. Letak geografis keempat provinsi yaitu Patani, Yala, Naratiwat, dan Satun serta ikatan-ikatan budayanya telah membantu memupuk satu rasa keterasingan di kalangan orang Melayu-Muslim terhadap lembaga sosial, budaya dan politik Thai (Pitsuwan, 1989: 20).

Kerajaan Langkasuka adalah kerajaan tertua di Negara Melayu, pada masa itu kerajaan Langkasuka agama resminya adalah agama Hindu-Budha. Kemudian diganti nama menjadi Negara Patani pada abad ke-15 M. Negeri Patani adalah kerajaan yang makmur dan berpengaruh di Asia Tenggara. Proses islamisasi mulai masuk ke Patani pada abad ke-12 M, dan berkembang pesat yang menyebabkan raja dan pembesar-pembesar memeluk agama Islam, tokoh yang mendakwahkan Isalam kerajaan Patani adalah seorang Da'i dari Pasai Aceh Indonesia yang bernama Syeikh Said dan Negara Patani diresmikan menjadi sebuah Negara yang beragama Isalam pada abad ke-15 M (Malik, 1993: 23).

Sebagian orang, dikenalkan Patani sebagai wilayah Thailand yang terletak bagian selatan, mungkin hanya sebuah kenangan Negeri Melayu. Orang-orang yang memperhatikan peta Asia Tenggara sekarang akan mengetahui bahwa

sebuah kerajaan Melayu yang dulu berjaya kini telah hilang dan tinggal kenangan. Dari sekian banyak kerajaan Melayu di Asia Tenggara pada abad ke 14-17 M, Patani adalah salah satu kerajaan yang sangat maju karena letaknya yang sangat strategis antara jalur perdagangan Cina dan India. Kemasyhuran dan kebesaran itu mencapai puncaknya pada zaman pemerintahan para Ratu (Bashah, 1994: 86).

Kemegahan sebuah kerajaan tidak pernah terlepas dari terancam penjajah, hal ini juga dialami Patani. Kerajaan Siam-Thai yang berasal dari wilayah utara mulai masuk dan menguasai sistem pemerintahan, Kesultanan Melayu Patani yang awalnya bebas independent, berubah menjadi negara bagian atau di bawah pemerintahan kolonial (Mujani, 2002: 34). Patani pada awalnya merupakan sebagai wilayah yang berpenduduk mayoritas berbangsa Melayu yang beragama Islam, sekarang terbalik menjadi minoritas dalam kekuasaan Siam-Thai yang penduduknya sebagian besar berbangsa Siam dan beragama Buddha.

Komunitas melayu Patani mulai terpisah dari kesatuan dunia melayu Asia Tenggara dan membentuk sebuah minoritas etnis keagamaan dalam kekuasaan kolonial Muang Thai. Ketika kaum melayu dipandang sebagai "masalah" oleh pemerintah Thai (Siam), orang-orang melayu yang berada di Malaysia justru memandang orang Melayu-Muslim sebagai "saudara yang terjajah". Meski jumlah penduduk melayu Patani minoritas di Muangthai namun tetap menjadi mayoritas di empat provinsi Muangthai yang berada di bagian selatan (Muzani, 1993: 325).

Perubahan yang paling dirasakan oleh Komunitas Melayu Patani semenjak dilaksanakan program-program pembaruan dalam masa pemeritahan Pibul Songkram (1939-1944) yang langsung menyentuh dasar-dasar, orang Melayu telah menjadi mangsa dasar siamisasi dan asimilasi kebudayaan (*dasar Rathaniyom*). Orang Melayu-Muslim harus menjalankan hidup dan tradisi dengan gaya hidup yang biasa diterapkan pada masyarakat Thai di bagian utara yang sangat tidak sesuai dengan adat istiadat Melayu apa lagi dengan ajaran pengangan agama. Dalam hal pakaian misalnya, pakaian yang dikenakan oleh orang Thai adalah pakaian yang tidak menutup aurat, seperti pakaian laki-laki yang berupa celana pendek dan pakaian perempuan yang harus menanggalkan jilbab serta tidak longgar dalam arti cukup ketat.

Keadaan inilah yang sampai sekarang masih terus berlanjut. Meskipun pemerintahan Thai mengakui bahwa minoritas di selatan beridentitas Melayu-tepatnya etnis melayu-Patani, tetapi kebijakan kultural yang ditetapkan pemerintah mengharuskan etnis melayu dan mengubah orientasinya pada kebudayaan Thai. Misalnya dengan peletakan patung-patung Budha di masjid dan sekolah serta keharusan menggunakan bahasa Thai diikuti pelarangan pemakaian bahasa Melayu di lembaga pemerintah seperti kantor dan sekolah. Masyarakat Melayu Patani merasa tidak senang dan tertekan dengan pembauran yang dilakukan mayoritas Thai. Tidak adanya perhatian terhadap perasaan kebangsaan Melayu dan keagamaan penduduk, membuat penderitaan itu semakin bertambah.

Pemerintah berusaha mensiapkan sekolah-sekolah Melayu dengan memasukkan kurikulum yang mengacu pada agama Budha atau malah menggantikan status sekolah Melayu muslim menjadi sekolah Thai. Pemerintah juga mencoba menghilangkan pengaruh bahasa melayu di kalangan penduduk Patani, tidak peduli terhadap perayaan hari besar Islam, menganiaya, menahan, dan kadang-kadang membunuh para pemimpin agama dan politik yang berasal dari etnis melayu (Malik, 1993:181).

Meskipun demikian, nasib etnis melayu di Patani tidak selalu hidup dalam masa kegelapan dan penderitaan. Pada tahun 1924 telah pulang seorang tokoh ulama karismatik dari kota suci Makkah al-Mukarramah, yaitu Haji Sulong bin Abdul Kadir. Awalnya Haji Sulong pulang ke tanah airnya untuk tinggal selama dua tahun dengan tujuan menghibur hati isterinya yang sangat sedih atas kehilangan anak sulungnya, Mahmud, yang meninggal dunia dalam usia dua tahun. Setelah mengetahui situasi di Patani, Haji Sulong mulai terlibat dalam perjuangan politik (Fathi, 2001b: 141)

Haji Sulong adalah seorang tokoh ulama Patani yang memimpin masyarakat untuk menghadapi sepak terjang “politik siamisasi” yang dilaksanakan oleh pemerintah Thai. Sejak tinggal di Patani, Haji Sulong berusaha mengembangkan dakwah bernuansa Islam di tengah masyarakat. Haji Sulong pun berhasil menyatukan dan membangkitkan semangat umat Melayu Patani. Haji Sulong tidak hanya terkenal dengan kitab-kitab karangannya tapi juga karena

mendirikan pondok yang menghasilkan banyak murid dan pendakwah yang aktif untuk menegakan keadilan di kalangan masyarakat melayu. Kemasyhuran Haji Sulong, sebanding dengan tokoh-tokoh ulama Patani sezaman, bahkan Haji Sulong berpartisipasi dalam perjuangan rakyat Patani pada tahun-tahun sekitar Perang Dunia kedua (Fathy, 2001: 83). Haji Sulong tergolong kelompok cendekiawan Melayu yang memimpin pembaharuan agama dan gerakan nasionalis di Malaya dan Indonesia pada dasawarsa pertama abad ke-20 (Pitsuwan, 1989:114).

Haji Sulong berkhidmat dengan keyakinan yang mantap dalam kegiatan politik dan aktivitas sosial, dalam hal politik, Haji Sulong berpendapat bahwa campur tangan politik dalam soal-soal hukum sejak masa Raja Chulalongkon (pada tahun 1868-1910) merusak kemurnian Islam. Hal ini dapat dibuktikan dengan lemahnya penerapan hukum agama di masyarakat, dalam kasus hak waris dan penutupan aurat misalnya, dalam hal sosial, aktivitas Haji Sulong tak lepas dari dakwah tentang Islam. Kedua hal inilah yang sering kali dicurigai oleh pemerintahan Thai (Pitsuwan, 1989: 49).

Aspirasi masyarakat melayu Patani terealisasi dalam sebuah kesepakatan pada tanggal 3 April 1947, golongan melayu Patani dibawah pimpinan Haji Sulong menyampaikan tuntutan7 perkara tentang pembentukan Otonomi Khusus kepada pemerintah Thai. Tuntutan itu mencerminkan gagasan-gagasan politik Haji Sulong dan upaya untuk mempertahankan kemandirian dan kemurnian bangsa Melayu yang Islam .

Tuntutan 7 perkara yang mengutarakan masyarakat Patani melalui Haji Sulong dan rekan-rekan mengundang ketidakpuasan dan kecurigaan pemerintah kepada Haji Sulong dan rekan-rekan. Kecurigaan tersebut diungkapkan melalui tuduhan bahwa Haji Sulong adalah pemberontak yang berencana memerdekakan Patani (Zaman, 1996: 17). Padahal, inti dari tuntutan7 perkara, tidak ada satupun tuntutan untuk merdeka atau memisahkan diri, karena tampaknya Haji Sulong masih berharap akan ada negosiasi yang memungkinkan Haji Sulong mencapai kompromi dengan hak-hak tertentu yang bias dicapai oleh Melayu Muslim di Patani (Thailand Selatan) tersebut, pada saat itu pemerintah pusat mengadakan

dialong dan pendekatan terhadap tuntutan umat Islam di Patani. Tuntutan 7 Perkara itu lebih mendekati sebagai daerah Otonomi Khusus, misalnya mereka menuntuk pemilihan gubernur secara langsung mengingat selama ini gubernur ditunjuk langsung oleh Perdana Menteri dan lebih sering berasal dari Bangkok beragama Buddha (non- Melayu), dan tidak mengerti bahasa Melayu. Haji Sulong juga menuntut rekrutmen pegawai negeri 80% dari Muslim Melayu atau pribumi di keempat provinsi tersebut Karena selama ini pegawai negeri lebih banyak diambilkan dari daerah lain yang seringkali tidak bias berbahasa Melayu dan memandang rendah terhadap pendudukan Muslim Melayu.

Dengan otonomi khusus, masyarakat Melayu Islam Patani dapat mempertahankan cara hidup tradisional sesuai dengan agama yang mereka anut. Meski begitu, Haji Sulong tidak memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai sifat jabatan orang yang akan dipilih untuk memerintah Patani. Tentunya orang tersebut harus berfungsi sebagai sebuah lambang komunitas yang berdasarkan syariat agama dan merupakan bagian dari pemerintahan di daerah itu, tidak lagi diperlakukan sebagai sesuatu yang terpisah dari proses pemerintahan (Mahmud, 2006: 70).

Haji Sulong seneruskan mobilisasi massa untuk menuntut tuntutan tujuh tersebut. Akibatnya Haji Sulong dan rekan-rekannya ditangkap oleh polisi pada 16 Januari 1948, dan dipenjarakan sampai 1952, karena Tuntutan 7 perkara yang mengutarakan masyarakat Patani melalui Haji Sulong dan rekan-rekan mengundang ketidakpuasan dan kecurigaan pemerintah kepada Haji Sulong dan rekan-rekan. Kecurigaan tersebut diungkapkan melalui tuduhan bahwa Haji Sulong adalah pemberontak yang berencana memerdekakan Patani, pada saat yang sama Phibun Songkram memberlakukan keadaan darurat. Tahun 1952 Haji Sulong dibebaskan dari penjara tanpa proses pengadilan dan dengan itu kembali memberikan semangat perlawanan karena pemerintah pusat juga tidak mengendorkan kontrol dan represi terhadap masyarakat Patani tersebut. Wibawa Haji Sulong yang semakin tinggi dan banyaknya pengikut, maka menimbulkan kekhawatiran bagi pemerintah pusat. (Suaedy, 2012: 102).

Maka pada tahun 1954, berlakulah takdir Allah SWT atas hambanya. Haji Sulong bersama rekan-rekan, dan anaknya Ahmad bin Haji Sulong hadir ke Senggoro memenuhi panggilan Letkol Bundert Lertpricha. Tidak diketahui apa yang terjadi setelah pertemuan tertutup itu, tetapi yang jelas sejak pertemuan itu Haji Sulong, dan rekan-rekannya hilang dan tidak kembali ke Patani lagi sampai sekarang. Apabila ditanyakan ke kantor polisi di Senggoro, jawabannya adalah Haji Sulong sudah diizinkan untuk pulang. Buku catatan polisi yang berisi tanda tangan Haji Sulong beserta rekan-rekan dijadikan sebagai bukti bahwa Haji Sulong telah dibebaskan. Dapat disimpulkan bahwa Haji Sulong dan rekan-rekannya telah ditangkap kembali "Tanpa Undang-Undang" setelah mereka menandatangani tanda tangan untuk pulang ke Patani. Haji Sulong dan rekan-rekannya kemudian dibunuh dan dibuang ke laut Senggoro berdekatan dengan pulau Tikus (Samila Beach) pada malam Sabtu, 13 Agustus 1954.

Kematian Haji Sulong yang masih merupakan misteri berdasarkan pengakuan seorang tukang perahu, pada tanggal 13 Agustus 1954 seorang tukang perahu diperintahkan oleh petugas keamanan untuk mendayung perahu ke pulau Tikus, kemudian di tengah perjalanan, para petugas membuang 4 karung yang diperkirakan membungkus mayat semakin menambah kemasyhuran Haji Sulong di kalangan rakyat Patani. Hal ini sekaligus menandai berakhirnya pemberontakan umum yang dipimpin ulama yang dimulai segera setelah berakhirnya Perang Dunia ke-2 (Che'daud, 1988: 355). Koalisi oposisi Melayu yang mempunyai landasan yang luas, yang telah Haji Sulong bangun, melanjutkan kegiatan-kegiatan anti pemerintah dengan menggunakan berbagai bentuk aktivitas kemasyarakatan (Pitsuwan, 1989: 128).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian mendalam dengan alasan dikarenakan adanya perbedaan realita empiris dan realita teoritis. Realita empiris bahwa dari fakta-fakta yang ada mengenai Haji Sulong telah menunjukkan sikap politik praktisnya dalam menilai, maupun menghadapi pemerintahan Thailand di Patani melalui gerakan politik anti pemerintah. Sedangkan realita teoritisnya masih sedikit penelitian yang mengkaji tentang Peranan Haji Sulong dalam Memperjuangkan Otomomi Khusus Patani

Thailand Selatan (1947- 1954). Perbedaan antara realita empiris dan realita teoritis tersebut maka membuat penulis ingin mengkaji lebih mendalam mengenai Peranan Haji Sulong dalam memperjuangkan Patani melalui permintaan Tuntutan 7 perkara, untuk mendapatkan otonomi khusus yang mempunyai identitas kebudayaan dan politik tersendiri di wilayah Thailand Selatan. Oleh karena itu, penulis memilih permasalahan ini dalam penelitian ilmiah untuk judul “Peranan Haji Sulong dalam memperjuangkan otonomi khusus Patani Thailand Selatan (1947- 1954)”.

1.2 Penegasan Pengertian Judul

Penegasan pengertian judul dimaksudkan menghindari kemungkinan terjadinya persepsi yang berbeda dalam memahami judul penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian perlu menegaskan pengertian terkait dengan judul “Peranan Haji Sulong dalam Memperjuangkan Otonomi Khusus Patani Thailand Selatan (1947- 1954).

Pengertian peranan menurut Soekanto (2002: 243), merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan.

Pengertian Haji Sulong menurut Zaman (1996: 6), adalah salah seorang tokoh ulama Patani yang ditakdirkan untuk memimpin masyarakat dalam menghadapi politik siamisasi atau asimilasi Kebudayaan (*Rathaniyom*) yang dilancarkan oleh pemerintahan Thailand. Haji Sulong juga terlibat dalam memperjuangkan demi memperbaiki nasib masyarakat muslim Patani, dengan menyampaikan tuntutan 7 perkara kepada pemerintah Thai. Tentang pembentukan otonomi khusus yang mempunyai identitas kebudayaan dan politik tersendiri di dalam lingkup wilayah Melayu Patani.

Pengertian perjuangan menurut Nurdy (2010: 7), menyatakan bahwa perjuangan adalah upaya untuk membebaskan diri dari cengkaman, kezaliman, kesewenang-wenangan dan penindasan penjajahan bangsa lain. Sedangkan perjuangan Patani adalah perjuangan untuk mendapatkan otonomi khusus yang

mempunyai identitas kebudayaan dan politik tersendiri dalam mempertahankan kemandirian dan kemurnian bangsa Melayu Islam Patani. .

Pengertian Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diberikan kepada daerah ‘tertentu’ untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri tetapi sesuai dengan hak dan aspirasi masyarakat di daerah tersebut. Kewenangan ini diberikan agar daerah ‘tertentu’ dapat menata daerah dan bagian dari daerah tersebut agar lebih baik lagi di bidang tertentu sesuai dengan aspirasi daerahnya (Dowa Palito, 2011). Otonomi khusus ditawarkan melebihi otonomi daerah biasa, karena otonomi ini diberikan kepada daerah ‘tertentu’ yang berarti daerah tersebut mempunyai kelompok gerakan kemerdekaan yang ingin memisahkan dirinya (daerahnya) dari wilayah Thailand. Jika secara tidak langsung, pemerintah memberikan otonomi khusus ini sebagai bentuk pendekatan damai agar kelompok gerakan tersebut tidak terus bergejolak.

Berdasarkan uraian tersebut, maka yang dimaksudkan dengan “Peranan Haji Sulung dalam Memperjuangkan Otonomi Khusus Patani Thailand Selatan (1947- 1954).” dalam penelitian ini adalah Usaha Haji Sulung dalam memperbaiki nasib masyarakat Melayu Muslim Patani, dengan menyampaikan Tuntutan 7 perkara kepada pemerintahan Thai, untuk mendapatkan otonomi khusus yang mempunyai identitas kebudayaan dan politik tersendiri di dalam lingkup wilayah Melayu Patani.

1.3 Ruang Lingkup penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas, agar terfokus pada permasalahan yang akan dikaji. Untuk menegaskan hal-hal yang menjadi fokus dalam penelitian ini maka penulis memberikan batasan dalam penelitian ini meliputi ruang lingkup spasial, ruang lingkup temporal, dan ruang lingkup materi.

Ruang lingkup tempat (spasial) yang diambil dalam penelitian ini adalah Patani (Thailand Selatan), melalui kajian pustaka. Hal ini yang dimaksudkan karena Patani merupakan salah satu dari negara melayu yang masih terjajah, dan ingin mendapatkan Otonomi Khusus, yang mempunyai identitas kebudayaan dan

politik tersendiri di dalam lingkup wilayah Melayu Patani, melalui Tuntutan Tujuh perkara oleh Haji Sulung.

Ruang lingkup waktu (temporal) dalam penelitian ini diawali tahun 1947-1954. Tahun 1947 dijadikan sebagai batas awal penelitian ini karena sejak tahun 1947 ini merupakan, munculnya permintaan Tujuh perkara oleh Haji Sulung, untuk mendapat otonomi khusus yang mempunyai identitas kebudayaan dan politik tersendiri di dalam lingkup wilayah Melayu Patani . Sedangkan tahun 1954 dijadikan batas akhir penelitian karena pada tahun 1954 ini merupakan tahun kematian Haji Sulung atau kehilangan Haji Sulung.

Ruang lingkup materi yang akan diteliti oleh penulis adalah: 1) mengenai latarbelakang Perjuangan Haji Sulung dalam memperjuangkan otomomi khusus Patani; 2) Usaha-usaha Haji Sulung dalam memperjuangkan otomomi khusus Patani; 3) Hasil Perjuangan Haji Sulung dalam memperjuangkan otomomi khusus Patani.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti lebih memfokuskan kajian tentang Peranan Haji Sulung dalam memperjuangkan otomomi khusus Patani di Thailand Selatan yang bereran aktif dalam mengembalikan kedudukan masyarakat Patani sebagai mana mestinya kehidupan masyarakat pada umumnya di Thailand. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. apa yang melatarbelakangi perjuangan Haji Sulung dalam memperjuangkan otomomi khusus Patani Thailand Selatan (1947-1954)?
2. bagaimana usaha-usaha Haji Sulung dalam memperjuangkan otomomi khusus Patani Thailand Selatan (1947- 1954)?
3. bagaimana hasil perjuangan Haji Sulung dalam memperjuangkan otomomi khusus Patani Thailand Selatan (1947- 1954)?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam kegiatan penelitian tersebut sebagai berikut:

1. untuk mengkaji apa yang melatarbelakangi perjuangan Haji Sulong dalam memperjuangkan otonomi khusus Patani Thailand Selatan (1947- 1954);
2. untuk mengkaji Bagaimana usaha-usaha Haji Sulong dalam memperjuangkan otonomi khusus Patani Thailand Selatan (1947- 1954);
3. untuk mengkaji bagaimana hasil perjuangan Haji Sulong dalam memperjuangkan otonomi khusus Patani Thailand Selatan (1947- 1954).

1.6 Manfaat Penelitian

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang terkait, antara lain:

1. bagi mahasiswa pendidikan Sejarah, dapat mengetahui secara jelas mengenai Peranan Haji Sulong dalam memperjuangkan otonomi khusus Patani Thailand Selatan (1947- 1954);
2. bagi membaca, dapat menambah pengetahuan dan memahami mengenai Peranan Haji Sulong dalam memperjuangkan otonomi khusus Patani Thailand Selatan (1947- 1954);
3. bagi almamater FKIP Universitas Jember, meruakan realisasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Dharma Penelitian;
4. bagi peneliti lain, sebagai informasi atau bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian yang sejenis dan sekaligus pengembangannya.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka dalam penelitian mengemukakan kajian tentang berbagai pendapat para ahli dan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas yaitu mengenai “Peranan Haji Sulong dalam memperjuangkan otomomi khusus Patani di Thailand Selatan (1947- 1954).” Penulis telah mendapat beberapa penelitian terdahulu yang akan direview terkait dengan judul penelitian baik yang di terbitkan dalam bentuk buku maupun yang tidak di terbitkan.

Zaman (1996) dalam buku yang berjudul “*Fatani 13 Ogos*” buku ini membahas tentang aktivitas Haji Sulong, tuntutan 7 perkara terhadapnya, dan misteri kehilangan Haji Sulong. Buku ini merupakan sebuah buku yang mencatatkan sejarah dan perjuangan umat Islam Patani yang dipimpin oleh Muhammad bin Haji Abdul Qadir yang lebih di kenal sebagai Haji Sulong Patani dalam menegakkan kedaulatan Islam. Patani sebagaimana tercatat dalam sejarah, adalah termasuk di antara negeri-negeri semenanjung Malaysia yang banyak memainkan peranan dalam bidang kegiatan Agamwan dan banyak pula melahirkan ulama-ulama dalam mengarang kitab dari berbagai bidang disiplin ilmu. Umumnya ulama-ulama ini dalam mengarang kitab mengakhiri namanya dengan kata 'Al-Fathoni', ini menunjukkan dengan secara jelas bahwa beliau berasal dari Patani. Di antaranya adalah Tuan guru Haji Sulong bin Abdul Kadir Al-Fathoni.

Haji Sulong Al-Fathoni atau Muhammad bin Haji Abdul Kadir bin Muhammad bin Tuan Minal dilahirkan di kampung Anak Ru, Patani pada tahun 1895. Beliau merupakan anak tunggal dari Haji Abdul Kadir dengan istrinya yang pertama, Syarifah (dipanggil Che' Pah). Ibunya meninggal dunia pada tahun 1907 ketika Haji Sulong baru berusia 12 tahun. Gelaran Haji Sulong adalah karena beliau merupakan anak sulung dalam keluarganya. Haji Sulong mulai mendirikan rumah tangga dengan Cik Sofiah binti Omar. Setahun saja berumah tangga, istrinya meninggal dunia sebelum sempat mendapat cahaya mata (anak). Dua

tahun kemudian, Haji Sulong menikah lagi dengan Hajah Khadijah binti Haji Ibrahim, Mufti Kelantan. Haji Sulong terkenal alim dalam bahasa arab dan menguasai sastra arab di mana kebolehnya diakui oleh orang-orang yang ahli di kalangan masyarakat arab sendiri. Haji Sulong menimba ilmu di Makkah selama 20 tahun. Tahun 1927, Haji Sulong pulang ke tanah airnya dengan rencana menetap selama dua tahun untuk menghibur hati istrinya yang amat sedih atas kehilangan anak pertamanya yang bernama Mahmud yang meninggal dunia dalam usia dua tahun, pada mulanya Haji Sulong tidak bermaksud melibatkan diri ke dalam perjuangan rakyat Patani, namun kecerdasan beliau dalam beberapa pertumbuhan keagamaan dan kebijakan, sedikit demi sedikit membuat beliau sadar akan kondisi rakyat dan keadaan negeri Patani yang memprihatinkan.

Perubahan yang dirasakan oleh komunitas Melayu Patani pada tahun 1938, pemerintatah Siam telah jatuh kembali ketangan Pibul Sungkram. Pibul Sungkram adalah seorang jenderal Thai yang memperkenalkan lagu dan bendera kebangsaan Siam. Pibul Sungkram telah menukarkan nama Siam kepada Thai dalam tahun 1939. Dalam tahun ini juga pahaman kebangsaan Thai telah merebak keseluruh negara Thai, Pibul Sungkram telah mengistiharkan apa yang dipangggilkan Undang-undang kepahaman kebangsaan Thai ada 18 Mei 1939. Ia telah menumbuhkan *Sepha Wattanatam* (Dewan Kebudayaan) yang bertujuan untuk memajukan paham kebangsaan Thai ke seluruh negara Thailand. Dewan kebudayaan inilah yang mengeluarkan Undang-undang paksa keatas orang ramai supaya memakai celana bagi lelaki dan gaun serta baju berlengan pendek bagi wanita, pakai topi dan makan menggunakan sendok ,garpu. Dari Undang-undang tersebut supaya rakyat Siam meniru cara hidup barat seperti menggunakan kata “Hello” dan mengiktirafan kesetiaan kepada negara Siam hanya kepada penganut agama buddha sehaba. Ini memberikan tekanan hebat kepada orang-orang Melayu Patani.

Tahun 1944 semua ulama dan guru-guru pesantren yang diketuai oleh Haji Sulong mengadakan perjumpaan lalu menubuhkan sebuah organisasi Islam Patani yang pertama diberi nama, *Majlis Haiatul Al-Munaffizul Al-ihkamul Syar'ieyah*, yang bertujuan untuk mewujudkan kerjasama antara ulama dengan

pemimpin-pemimpin setempat bagi mempertahankan maruah dari tindakan dasar Siam. Melalui organisasi inilah Haji Sulong dan teman-teman ulama lain memperjuangkan hak Islam dan menentang kezaliman Siam, pada 3 April 1947 golongan Melayu Patani Raya di bawah pimpinan Haji Sulong menyampaikan rencana tujuh pasal yang membahas tentang otonomi daerah kepada pemerintahan Thai. Namun, Pemerintah Thai tidak bersedia merundingkan soal pembentukan daerah otonom. Pemenuhan tuntutan golongan Melayu Patani dikhawatirkan akan mencetuskan tuntutan-tuntutan serupa dari berbagai minoritas etnik dibagian-bagian lainnya di negeri Thai. Bagi pemerintah Thai, Patani akan tetap dianggap sebagai suatu bagian integral dari negara kesatuan dengan birokrasi yang dikontrol dari pusat dan dengan sistem hukum tunggal, kecuali bidang hukum perorangan dan kebiasaan-kebiasaan di bidang hukum warisan yang sudah disahkan sebelumnya.

Pada 3 April 1947 sejumlah penyiasat dari Bangkok tiba di Patani. Jam 10.00 pagi, Haji Sulong di jemput untuk berbincang bertempat di Dewan Kerajaan Tempatan Patani, Haji Sulong membawa bersamanya tuntutan 7 perkara diiringi oleh jawatan kuasa MAIF dan 500 rakyat Patani. Dalam perjumpaan itu Haji Sulong menyerahkan tuntutan rakyat Patani dan menjelaskan dua sebab penting mengapa tuntutan itu dibuat:

1. Rakyat Patani dalam keadaan tertindas oleh pegawai kerajaan Siam di mana siapa yang tidak bersetuju atau membantah di tangkap kemudian dibawa kesuatu tempat. Bila sampai separuh jalan lalu ditembak dengan alasan coba melarikan diri atau coba melawan. Peristiwa seperti itu telah meragut puluhan nyawa rakyat yang tidak bersalah. Penduduk tidak berani membuat laporan kepada pihak yang lebih kuasa karena mereka akan disiksa dengan lebih buruk lagi;
2. Berlakunya penipuan dan pemerasan harta rakyat oleh pegawai atasan serta membunuh siapa yang melawan.

Akibat tuntutan 7 perkara tidak mendapat persejuaan dari kerajaan Thai, kama Haji Sulong menjalankan aktivitasnya di masjid dan pesantren-pesantren

untuk menggerakkan dan menanamkan semangat patriotisme dikalangan rakyat Melayu Islam Patani demi menegakkan syariah Islam dan menuntut keadilan. Akhir tahun 1947, di Patani berlaku haru hara dimana 200 buah rumah orang-orang Siam serta pos-pos polis dibakar di sekitar bandar Patani. Dan tersebar poster-poster anti Siam yang berbunyi “Hidup Melayu, Mampus Siam”

Ditegaskan pula oleh Malek (1993) dalam karyanya yang berjudul “Umat Islam Patani Sejarah dan Politik” Mengemukakan politik dan pergerakan Nasionalisme Islam Patani terhadap pemerintahan Thai dan Peristiwa-peristiwa Penting dalam kebangkitan nasionalisme Patani yang berkaitan dengan tuntutan 7 perkara dan penahanan Haji Sulong oleh Pemerintahan Thai. Dalam tahun 1944, pentadbiran Phibul Songkram telah bertindak memansuhkan Majlis hal ihwal Islam Wilayah. Ini termasuk jabatan kadi dan perundangan Islam mengenai hukum nikan-cerai dan harta pusaka, harus sesuai dengan sistem perundangan Awam Thai. Pemansuhan ini telah mendapat bantahan keras dari masyarakat Islam Patani, dan Haji Sulong yang menerusi masalah tersebut karena beliau selaku pemimin Persatuan Semangat Patani.

Selasa 1 April 1947, telah mengadakan bermusyawarah Agung pertumbuhan Semangat Patani, dengan kehadiran seramai 100 orang ahli-ahlinya, dalam bermusyawarah telah memutuskan perlantikan, Haji Sulong sebagai pengurus dan Haji Sulong memilih Tengku Mahmud Mahyiddeen yang berada di kota Bahru, Kelantan (Malaysia) sebagai ketua perwakilan untuk mengadakan dialog resmi mengemukakan bantahan Tuntutan 7 perkara itu kepada kerajaan Siam-Thai. Bersama 3 April, surat bantahan ini telah dihantarkan kepada perdana Menteri Thai (*Luang Thamrong Navaswasdi*), yang telah menggantikan Pridi Phanomyong menerusi kementerian dalam Negeri. Bantahan ini berdasarkan kepada kehidupan masyarakat Melayu patani yang semakin cemas dengan kejadian yang dilakukan oleh para pegawai Siam yang menindas dan menganyanyi rakyat yang beragama Islam. Mereka ditangkap bersabit dengan sesuatu dan sesuatu dan kemudiannya telah ditembak dengan percuma atas alasan orang-orang yang bersalah itu cuba melarikan diri. Disamping itu perbuatan rasuah, penipuan dan penyelewengan seringkali berlaku di seluruh wilayah Patani.

Tuntutan tersebut bukanlah bertujuan untuk memecahkan dasar perlembagaan Negara Thai, yang telah sedia termaktub. Tetapi bertujuan untuk memperbaiki nasib bangsa Melayu dan tanah air mereka sejajar dengan kehendak dunia yang sedang sibuk memperjuangkan kepentingan hakasasi kemanusiaan dan kemerdekaan terhadap bangsa yang terjajah.

Pitsuwan (1989: 68) dalam buku yang berjudul "*Islam di Muangthai Nasionalisme Melayu Masyarakat Pattani*" Buku ini membahas tentang kondisi Patani sebelum dan ketika di bawah pemerintah Thailand, tempat-tempat bersejarah di Patani, dan pendiritaan yang dialami bangsa Melayu. Peristiwa berkesimpulan bahwa pendekatan-pendekatan yang di ambil oleh Pemerintahan Muang Thai dalam program Siamisasi atau Asimilasi masyarakat Melayu Patani dalam aspek keagamaan dan kebudayaan, baik Kesejangan atau perbedaan agama, bangsa, dan budaya tidak memberi dampak positif dan hasil yang memuaskan bagi pemerintahan Muang Thai.

Demikianlah, maka pada 3 April 1947, golongan Melayu Muslim Patani Raya di bawah pimpinan Haji Sulong menyampaikan kepada penerintahan Thai sebuah rencana yaitu tuntutan tujuh perkarabagi pembentukan sebuah daerah otonomi. Tuntutan ini berisi tuntutan tujuh perkara yang mengarah pada pemberian daerah Otonomi Khusus di empat wilayah Selatan. Tujuh tuntutan ini yang nantinya dikenal dengan nama "Tujuh Tuntutan Haji Sulong" meliputi:

1. Pengangkatan seorang komisaris tinggi untuk memerintah Daerah Patani Raya dengan wewenang penuh untuk memecat, menskors, atau mengganti semua pejabat pemerintah yang bekerja di daerah itu; orang itu harus putra daerah dan dipilih oleh rakyat dalam suatu pemilihan umum yang diadakan khusus untuk tujuan itu.
2. Delapan puluh persen (80%) dari pejabat pemerintah di daerah itu harus Melayu Patani (untuk mencerminkan rasio penduduk).
3. Bahasa Melayu dan Bahasa Siam akan menjadi bahasa resmi.
4. Bahasa Melayu akan diajarkan di sekolah dasar.

5. Hukum Islam akan diberlakukan di empat wilayah – Patani, Yala, Narathiwat, dan Setun – dengan pengadilan-pengadilan Islam yang terpisah dan bebas dari sistem peradilan pemerintah.
6. Semua hasil pajak di empat wilayah – Patani, Yala, Narathiwat, dan Setun akan digunakan untuk kesejahteraan rakyat selatan.
7. Majelis Agama Islam propinsi akan diberi wewenang penuh atas perundang-undangan menurut hukum Islam mengenai semua urusan Melayu dan kebudayaan Melayu, dibawah wewenang Komisaris Tinggi seperti yang disebut dalam No.

Dari tujuh tuntutan tersebut, tidak ada satu pun tuntutan untuk merdeka atau memisahkan diri, karena tampaknya mereka masih berharap akan ada negosiasi yang memungkinkan mereka mencapai kompromi dengan hak-hak tertentu yang bisa dicapai oleh Melayu Muslim di empat provinsi yaitu: Patani, Yala, Narathiwat dan Setul. Pada saat itu juga pemerintahan pusat membuka dialog dan pendekatan persuasif terhadap tuntutan umat Islam di Patani. Tuntutan tujuh itu lebih mendekati sebagai daerah Otonomi Khusus, misalnya mereka menuntut pemilihan gubernur secara langsung mengingat selama ini gubernur ditunjuk langsung oleh Perdana Menteri dan seringkali berasal dari kalangan orang Siam non- Muslim dan tidak mengerti bahasa Melayu.

Rencana itu mencerminkan gagasan-gagasan politik Haji Sulong dan upayanya untuk mempertahankan kemandirian dan kemurnian Islam. Haji Sulong tidak mengusulkan pembentukan sebuah negara merdeka, tetapi hanya sebuah entitas teritorial dan kebudayaan yang otonom untuk mempertahankan identitasnya yang khusus. Walaupun ia tidak memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai sifat jabatan orang yang akan dipilih untuk memerintah daerah itu, sudah jelas bahwa ia harus berfungsi sebagai lembaga komunitas Islam yang berdasarkan *Syari'ah*. Islam akan menjadi bagian dari pemerintahan di daerah itu. Haji Sulong berhasil menggalang dukungan dari kaum ulama dan politisi Melayu-Muslim, yang telah dikecewakan oleh sistem parlementer yang tidak menghasilkan sesuatu perbaikan di daerah mereka. Bahkan anggota-anggota parlemen yang beragama Buddha merasa yakin bahwa Haji Sulong mendapat

dukungan penuh dari penduduk Melayu dan bahkan tuntutan mereka wajar mengingat kenyataan bahwa tuntutan itu didasarkan atas penderitaan-penderitaan yang nyata yang dapat dikurangi di bawah struktur kekuasaan yang ada.

Fathi (2001) dalam buku yang berjudul “Ulama’ Besar dari Patani” yang membahas diantaranya kelahiran dan pendidikan Haji Sulong, Patani menjelang kepulangan Haji Sulong mendirikan madrasah al-Ma’arif al-Watonyah, juga tentang Haji Sulong dan tuntutan 7 perkara. Pada tahun 1947 hingga penangkapan untuk kedua kali pada tahun 1954 dan berakhirnya riwayat Haji Sulong bin Haji Adul Kadir bin Muhammad bin Tuan Minal al-Fatani. Pada tahun 1947-1954 adalah tahun yang sangat genting dalam sejarah Patani, pada tahun ini juga Haji Sulong terlibat dalam perjuangan rakyat Patani menjadi semakin nyata. Kedudukan Haji Sulong pada waktu itu, sebagai ketua MAIP (Majlis Agama Islam Patani), suatu jawatan yang dianggap mewakili orang Islam Patani, dan juga rakyat menganggap beliau sebagai pemimpin dan sebagai juru bicara bagi mencapaikan hasrat mereka kepada kerajaan Thai.

Tidak lama setelah Phibul menjadi perdana menteri dan melancarkan semboyan Thai Rathaniyumnya, Haji Sulong mendirikan al-Hai'ah al-Tanfiziah li al-Ahkam al-Shar'iyah (Lembaga Pelaksanaan Hukum Syari'ah) pada tahun 1939. Tujuannya ialah untuk mendidik masyarakat Patani agar memahami hukum agama secara tepat. Hal ini dilakukan sebagai upaya tandingan terhadap kegiatan pemerintah Siam yang ingin mengsiamkan orang Melayu dan menodai kesucian ajaran agamanya; keduanya termasuk dalam agenda PanThai atau Thai Raya yang didalangi oleh Phibul. Sebelas orang dilantik untuk menjadi pengurus dalam lembaga ini, diantaranya ialah Haji Mat Pauh, Haji Hasan Mak Enggol, Haji Abd. Majid Embong (Chaok), Tok Guru Bermin dan lain-lain. Sampai sejauh ini belum diketahui sejauh manakah peranan yang telah dimainkan oleh Lembaga ini sehubungan dengan slogan Thai Rathaniyum ini. Sudah dipahami bahwa kedatangan Haji Sulong, pada awalnya, tidak ingin terlibat dengan perpolitikan di Patani. Kondisi ketidakadilanlah yang membuat Haji Sulong tidak sanggup untuk berdiam diri, Haji Sulong pun mulai berpartisipasi dalam bidang politik.

Meski tidak diketahui dengan pasti siapa pencetus ide dibalik lahirnya majlis-majlis ini, kehadiran lembaga-lembaga ini diharapkan menjadi penghubung antara rakyat Melayu Patani dengan Bangkok tanpa terikat dengan birokrasi yang rumit dan kepentingan golongan. Dalam keadaan-keadaan tertentu, majlis menjadi wadah bagi orang-orang Melayu Islam Patani, diempat wilayah untuk menyampaikan suara dan cita-cita kepada kerajaan menyangkut setiap permasalahan umat Melayu Patani. Haji Sulong termasuk golongan ulama yang mencurigai keterlibatan kerajaan dalam urusan agama. Haji Sulong berpendapat bahwa campur tangan politik dalam soal-soal hukum agama sejak masa Raja Chulalongkorn telah merusak kemurnian dan kesucian Islam. Terlepas dari ada tidaknya kerjasama antara orang Islam dengan kerajaan, Haji Sulong berpendapat bahwa hukum Islam seharusnya diurus oleh lembaga kehakiman Islam tersendiri.

Menurut catatan, “tuntutan 7 perkara” oleh Haji Sulong kepada kerajaan Siam-Thai bermula pada hari Selasa 1 April 1947, apabila pemimpin-pemimpin Islam setempat mengadakan satu pertemuan di Patani, dalam pertemuan ini semua bersepakat bahwa mereka akan mengemukakan sebuah memorandum mengadungi beberapa tuntutan masyarakat Islam Patani kepada wakil-wakil pemerintahan Thai dalam satu perundingan yang akan diadakan. Setelah Phibul berkuasa, dalam hal hubungan Memorandum berisi rencana tujuh perkara ini, pemerintah juga tidak bersedia memenuhi tuntutan-tuntutan itu, dengan pertimbangan bahwa tuntutan-tuntutan itu terlalu melanggar kekuasaan pusat dan dari sisi ekonomi terlalu mahal. Haji Sulong dibebaskan empat tahun kemudian yaitu pada tahun 1952, Haji Sulong kembali ke Patani dan meneruskan pekerjaan awalnya yaitu menjadi "Tok Guru" dengan mengajar di pondok pesantren dan juga dari kalangan masyarakat.

Setelah dua tahun dibebaskan, pada tanggal 13 Agus 1954, Haji Sulong ke Songgora di jemput oleh Gebenur Songgora untuk di interogasi oleh pihak kepolisian atas nama-nama yang tercantum dalam surat perintah dari pihak kepolisian di Songgora itu, yaitu Haji Sulong, Wan Usman bin Wan Ahmad, Cik Ishak bin Abas, dan Ahmad To'mina bin Haji Sulong anak kandung Haji Sulong sendiri. Menurut surat perintah Gebenur Songgora, Ahmad To'mina tidak

tercantum dalam daftar pihak kepolisian di Songgora, Ahmad To'mina mengikut ayahnya ke Songgora dalam upaya menterjemah bahasa, dengan karena Haji Sulong tidak bisa mengerti dan berbicara dalam bahasa Thai. Setelah di interogasi oleh pihak kepolisian, Haji Sulong bersama anak dan rekan-rekannya telah diizinkan untuk pulang ke kampung halamannya masing-masing, setelah ditandatangani oleh Gebenur Songgora. Kemudian mereka dihilangkan secara misterius oleh Polisi Songgora, terus Haji Sulong bersama anak dan rekan-rekannya dibunuh dan dibuang kelaut Songgora berhampiran dengan Pulau tikus, bertepatan pada malam Sabtu 13 Agustus 1954 sampai disini akhir riwayat Haji Sulong.

Fathy (1994) dalam bukunya yang berjudul "Pengantar Sejarah Patani" membahas tentang kondisi Patani sebelum dan ketika di bawah pemerintahan Thai pada masa Haji Sulong memimpin masyarakatnya dalam sistem sepak terjang politik Thai Rattamanon oleh Phibul Songgram, dan penderitaan yang dialami oleh Umat Melayu Patani pada saat menjelang perang dunia ke-2. Haji Sulong ialah tokoh ulama' Patani yang seolah-olah telah disediakan untuk memimpin masyarakat Patani dalam menghadapi sistem sepak terjang politik Thai (*Rathaniyum*), oleh Phibul Songgram. Dibawah gerakan ini orang Melayu Patani tidak lagi dibenarkan menggunakan pakaian tradisional Melayu Patani, tidak boleh lagi menggunakan nama-nama Melayu-Arab sebagaimana lazim serta juga tidak boleh menggunakan bahasa dan tulisan jawi Melayu Patani. Sebaliknya mereka dipaksa menggunakan pakaian cara Barat seperti bercelana dan bertopi (bagi lelaki) dan bergaun serta baju lengan pendek (bagi perempuan). Dengan gerakan politik Thai (*Rathaniyum*), ini sangat mengejutkan orang Melayu di Patani. Harapan orang Melayu Patani untuk mendapat otonomi khusus bukan saja tidak berhasil, akan tetapi malahan kedudukan lama mereka yang sedih dinikmati sebelum zaman revolusi Thai semakin dipersempitkan peluang untuk masyarakat Patani.

Pada tahun 1944, Phibul terlibat dalam kepengurusan Hakim Agama (Qadhi) dan membubarkan undang-undang keluarga serta pembagian harta waris (*faraidh*) Islam. Kemudian Phibul menggantikannya dengan undang-undang sipil

kerajaan. Pembagian harta waris pada hukum Islam untuk bagian perempuan adalah setengah dari bagian laki-laki. Sementara dalam undang-undang sipil kerajaan pembagian harta waris bagi perempuan dan laki-laki adalah sama. Setiap ada masalah yang menyangkut kedua aturan agama tersebut – undang-undang keluarga dan pembagian harta waris – maka akan diputuskan berdasar undang-undang sipil kerajaan. Masyarakat Melayu Patani Merasa tidak puas dengan keadaan seperti ini, lalu mendirikan Majelis-Majlis Agama Islam di keempat wilayah selatan: Patani, Yala, Narathiwat dan Setun. Di Patani, Haji Sulong terpilih menjadi Ketua, sementara di Yala, yang terpilih sebagai ketua adalah Haji Mustafa Awang, di Narathiwat terpilihlah Haji Daud Mat Diah dan di Setun adalah Haji Abdullah Lang Putih (kemudian Anggota Perlemen Setun dan Menteri Kesehatan Thai).

Politik yang diterapkan oleh pemerintahan Thai tersebut, membuat ketidakpuasan kepada pemimpin-pemimpin masyarakat Islam di wilayah Selatan, maka Haji Sulong mengadakan sebuah pertemuan untuk bersepakatan bagi menyerahkan sebuah memoranddum yang mengandung beberapa tuntutan dari masyarakat Patani kepada memerintahan Thai, untuk mendapat keadilan dengan melalui tuntutan 7 perkara. Akhirnya pada 13 Agustus 1954 Haji Sulong dihilangkan secara misterius oleh kerajaan Siam.

Nurdi (2010) dalam bukunya yang berjudul “Perjuangan Muslim Patani Sejarah Panjang Penindasan dan Cita-cita Perdamaian” Memaparkan tentang kondisi sosial Umat Melayu Patani terhadap konflik dan kebijakan-kebijakan program Asimilasi dan penghausan budaya Melayu oleh pemerintah Thailand di Patani. Pada tahun 1947-1954 adalah tahun-tahun penting bagi Haji Sulong dan juga sangat penting bagi seluruh seluruh masyarakat di Patani. Jawatan Haji Sulong sebagai ketua MAIP (Majlis Agama Islam Patani), dimanfaatkannya untuk memimpin umat Islam Patani melawan ketidak ada keadilan dan penindasan yang dilakukan oleh pemerintahan Thailand.

Tahun itu juga rakyat Patani memberi kepercayaan kepemimpinan kepada Haji Sulong dan melantiknya sebagai penyambung lidah rakyat. Pada 1 April 1947, berlangsung pertemuan antara para pemimpin Melayu di Patani. Hasil dari

pertemuan tersebut, para pemimin Patani menyampaikan memorandum kepada wakil-wakil pemerintahan Siam-Thai. Kesepakatan yang disusun dalam pertemuan tersebut, kemudian dirangkaikan dalam satu senarai yang mengadungi tujuh tuntutan rakyat Patani, untuk disamaikan kepada perdana menteri Thailand.

Tahe (2010) dalam skripsinya berjudul “Perjuangan Politik Haji Sulong di Patani Thailand(1947-1954)” yang membahas tentang golongan Melayu- Muslim Patani raya di bawah pimpinan Haji Sulong menyampaikan tuntutan 7 perkara yang membahas tentang otonomi daerah kepada pemerintahan Thai. Namun pemerintahan Thai tidak bersedia merundingkan soal pembentukan daerah otonomi. Pemenuhan tuntutan golongan Melayu- Muslim dikhawatirkan akan mencetuskan tuntutan-tuntutan serupa dari berbagai minoritas etnik dibagian-bagian lainnya di Negeri Thai. Pada tanggal 3 April 1947, golongan melayu Patani di bawah pimpinan Haji Sulong menyampaikan tuntutan 7 perkara tentang pembentukan otonomi daerah kepada pemerintah Thai. Tuntutan itu mencerminkan gagasan-gagasan politik Haji Sulong dan upaya untuk mempertahankan kemandirian dan kemurnian bangsa Melayu yang Islam. Inti dari tuntutan 7 perkara bukan untuk pembentukan sebuah negeri merdeka, yang lebih tepat adalah pembentukan wilayah otonomi yang memiliki hak untuk mempertahankan identitas Melayu.

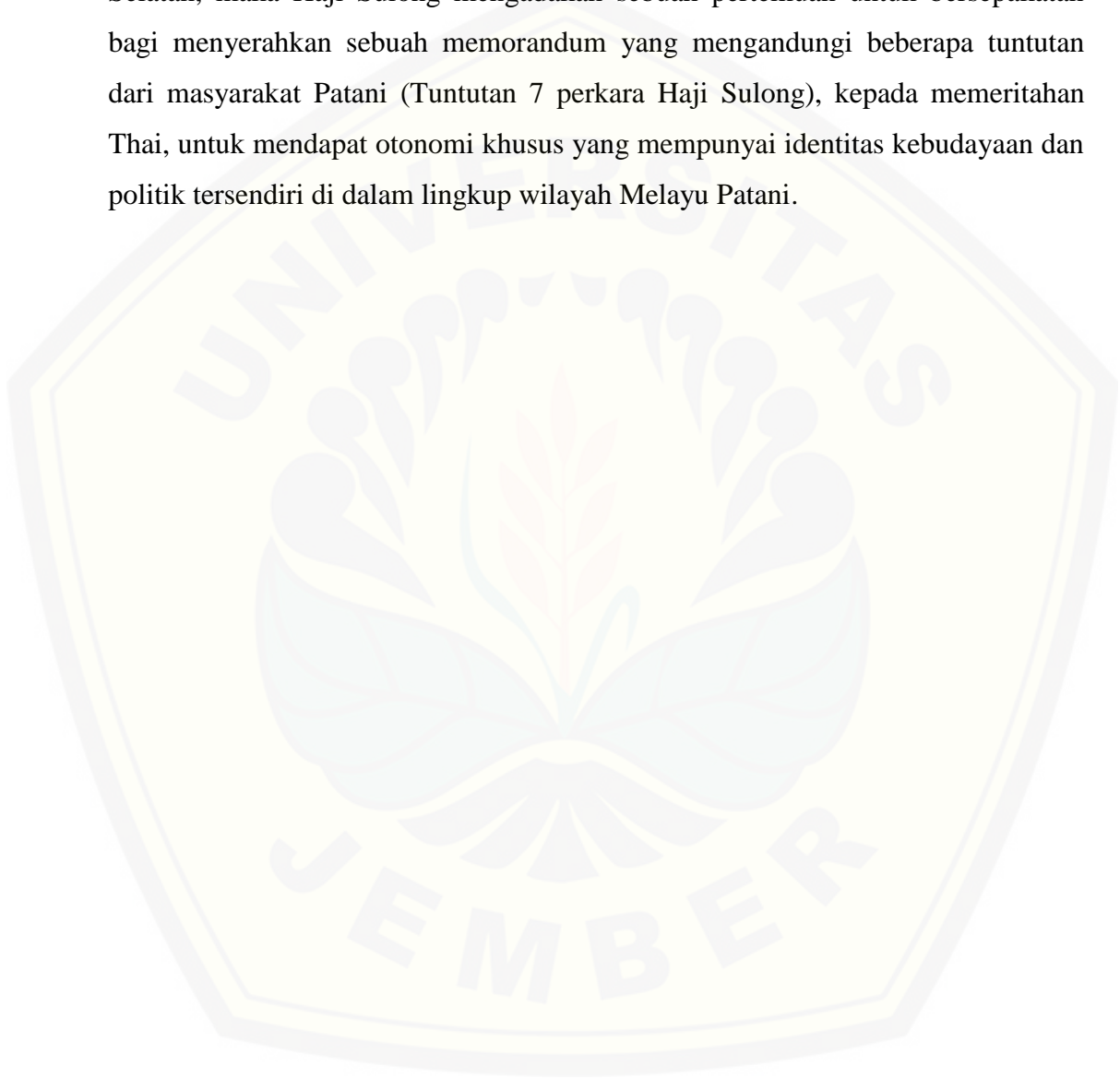
Kematian Haji Sulong yang masih merupakan misteri berdasarkan pengakuan seorang tukang perahu, pada tanggal 13 Agustus 1954 ia diperintahkan petugas keamanan untuk mendayung perahu ke pulau Tikus, kemudian di tengah perjalanan, para petugas membuang 4 karung yang diperkirakan membungkus mayat semakin menambah kemasyhuran beliau di kalangan rakyat Patani, bahwa Haji Sulong dan rekan-rekan di bunuh oleh kerajaan siam. Adapun skripsi Nuh (2004) berjudul “*Perjuangan Politik Haji Sulong dalam Pembebasan Masyarakat Patani di Thailand Selatan*”. Yang memuat deskripsi wilayah Patani secara umum yang meliputi kondisi geografi, kondisi sosial ekonomi, kondisi politik, penyebaran agama Islam ke Patani dan perkembangannya dan tentang biografi Haji Sulong, perjuangan Haji Sulong dalam GEMPAR dan detik-detik terakhir perjuangannya dan organisasi perjuangan setelah wafatnya Haji Sulong.

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah yang bertujuan merekonstruksi kejadian masa lampau. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Sosiologi politik. Sosiologi politik adalah ilmu yang berkaitan dengan kekuasaan, tentang siapa yang berkuasa, bagaimana memperoleh kekuasaan dan mengapa berkuasa (Nasikun, 1987: 16). Setiap kelompok manusia, dari yang terkecil sampai yang terbesar, dari yang bersifat sekejap sampai yang paling stabil, ada yang memerintah dan ada yang mematuhi, ada yang memberikan perintah dan ada yang menaati, ada yang membuat keputusan dan ada yang mematuhi keputusan tersebut. Pendekatan sosiologi politik ditujukan pada para pembuat keputusan yang memiliki kekuasaan untuk membuat keputusan-keputusan yang langsung menentukan perkembangan politik dan jalannya pemerintahan suatu masyarakat. Pendekatan sosiologi politik mempelajari tentang fenomena kekuasaan di dalam setiap pengelompokan manusia, bukan hanya di dalam negara, masing-masing kelompok manusia terwujud dalam suatu struktur yaitu suatu kerangka di mana aspek-aspek konflik dan integrasi dari kekuasaan saling memainkan peran (Duverger: 1998).

Sedangkan teori, penulis menggunakan teori konflik. Konflik sebagai sebuah fenomena sosial, konflik senantiasa terjadi dalam kehidupan masyarakat. Terdapat berbagai definisi yang membahas tentang konflik. Duverger mengatakan bahwa konflik merupakan salah satu dari dua aspek terpenting dalam politik. Aspek terpenting lainnya ialah integrasi. Oleh karena konflik itu ada maka perlu diusahakan untuk melenyapkannya atau paling kurang untuk menguranginya sehingga memungkinkan terjelmanya suasana sosial yang intergratif didalam masyarakat (Duverger, 1982: 171). Faktor-faktor penyebab konflik dibagi menjadi dua klasifikasi umum, yaitu (1) faktor-faktor yang berkerja dalam tingkat diri perorangan (individual), seperti tingkat kecerdasan (*apititude*) dan faktor-faktor psikologis, (2) faktor-faktor kolektif seperti ras, perdebaan sosial, agama dan hal-hal yang bersifat sosio-kultural (Duverger, 1982: 173).

Seperti konflik yang berlaku di Patani ketika pemerintah Phibun Songkram membentuk sistem politik Thai Rathaniyom. Dibawah sistem ini orang Melayu Patani tidak lagi dibenarkan menggunakan pakaian tradisional

orang Melayu Patani, tidak boleh lagi menggunakan nama-nama Melayu serta tidak boleh menggunakan bahasa dan tulisan jawi (Melayu-Arab Patani). Dari politik yang diterapkan oleh pemerintahan Thai tersebut, membuat ketidakpuasan kepada pemimpin-pemimpin masyarakat Islam di wilayah Patani Thailand Selatan, maka Haji Sulong mengadakan sebuah pertemuan untuk bersepakatan bagi menyerahkan sebuah memorandum yang mengandung beberapa tuntutan dari masyarakat Patani (Tuntutan 7 perkara Haji Sulong), kepada pemerintah Thai, untuk mendapat otonomi khusus yang mempunyai identitas kebudayaan dan politik tersendiri di dalam lingkup wilayah Melayu Patani.



BAB 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang peneliti gunakan dengan judul “Peranan Haji Sulong Dalam Memperjuangkan Patani Thailand Selatan (1947- 1954)” adalah penelitian sejarah (metode historis). Metode penelitian sejarah adalah prosedur kerja yang dilakukan oleh sejarawan yang berisikan prinsip-prinsip dan aturan-aturan untuk penulisan kisah serkait suatu objek (peristiwa atau kejadian) di masa lampau berdasarkan jejak-jejak yang ditinggalkan oleh objek di masa lampau tersebut (Gottschalk, 1986:32). Jadi penelitian sejarah adalah prosedur kerja yang harus dilakukan sejarawan secara kritis dan hati-hati dalam usaha mencari, menilai, menafsirkan sumber, serta menulisnya menjadi suatu kisah sejarah yang kronologis, sistematis, dan logis. Prosedur penelitian sejarah meliputi empat langkah, yaitu: 1) Heuristik, 2) Kritik, 3) Interpretasi, dan 4) Historiografi.

3.1 Heuristik

Langkah pertama dalam melakukan penelitian ini adalah Heuristik, dalam langkah heuristik penulis melakukan kegiatan untuk mendapatkan sumber-sumber yang di perlukan dalam penelitian dan penulisan sejarah. Oleh karena kajian ini merupakan kajian pustaka, maka penulis harus mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah, baik berupa artikel, buku, majalah, maupun laporan yang terkait dengan Peranan Haji Sulong Dalam Memperjuangkan Patani Thailand Selatan (1947- 1954). Dalam penelitian ini, sumber-sumber sejarah yang diperoleh oleh penulis dari beberapa perpustakaan seperti Perpustakaan Pusat Universitas Jember, dan Buku-buku milik pribadi penulis. Sumber sejarah yang berhasil terkumpul terbagi menjadi dua yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

Adapun sumber primer penulis menemukan kesulitan dalam memperoleh sumber primer karena peredaan penerbitan buku-buku Haji Sulong dilarang oleh pemerintah, sumber yang sama dapat dijumpai berupa data dari internet dan data tertulis lainnya dari dokumen lokal, tetapi penulis juga beruntung dapat

menemukan data yang relevan, khususnya buku-buku terbitan Malaysia yang dijadikan sebagai sumber sekunder. Sedangkan sumber sekunder yang digunakan oleh penelitian antara lain: Zaman tebit tahun 1996 yang berjudul “*Fatani 13 Ogos*”, Mahmud tebit tahun 2006 yang berjudul “*Sejarah Perjuangan Melayu Patani*”, Fathy terbit tahun 2001 yang berjudul “*Ulama Besar dari Patani*”, Malek terbit tahun 1993 yang berjudul “*Umat Islam Patani Sejarah dan Politik*”, Fathy terbit tahun 1994 yang berjudul “*Pengantar Sejarah Patani*”, dan-buku penunjang lainnya yang terkait dengan judul penelitian karya ilmiah ini.

3.2 Kiritik

Setelah sumber-sumber berhasil dikumpulkan, maka peneliti melakukan kritik terhadap sumber data yang diperoleh. Langkah kritik dalam metode sejarah adalah menilai, menguji atau menyelidiki jejak-jejak sebagai usaha untuk mendapatkan jejak asli atau sumber yang benar-benar asli serta mengandung informasi yang relevan untuk cerita sejarah yang disusun (Sjamsuddin, 2007: 103). Peneliti melakukan dalam langkah ini untuk memproleh keabsahan sumber yang diperoleh. Untuk itu dilakukan uji keabsahan tentang keaslian sumber yang dilakukan melalui kritik ekstern dan kritik intern. Cara yang dilakukan penulis untuk melakukan kritik ekstern ini adalah dengan melihat secara teliti bentuk sampul. Judul, tahun terbit, nama pengarang, dan latar belakang apakah sumber sejarah tersebut sesuai dan sejaman dengan masalah yang dibahas.

Selain itu, penulis juga mencermati gaya bahasa yang dipakai dan melihat kondisi kertas yang digunakan apakah sesuai dengan tahun terbitnya atau tidak. Setelah melakukan kritik ekstern, penulis menilai isi dari sumber atau melakukan kritik intern. Cara yang dilakukan penulis dalam tahap ini adalah dengan menilai isi sumber dan membandingkan dengan sumber lain apakah relevan dengan permasalahan yang dikaji serta dapat dipercaya kebenarannya. Dengan demikian, kritik intern dapat menghasilkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan atau di buktikan kebenarannya.

3.3 Intepretasi

Langkah selanjutnya dalam penelitian sejarah adalah interpretasi. interpretasi merupakan usaha untuk mewujudkan rangkaian fakta-fakta sejarah yang mempunyai kesesuaian satu sama lain yang kemudian dilakukan suatu penafsiran agar bermakna. Interpretasi dilakukan untuk menentukan makna yang saling berkaitan dalam fakta-fakta yang telah diperoleh. Pada tahap ini, peneliti menyusun fakta-fakta dari sumber sejarah yang telah diperoleh, merangkai, dan menghubungkan antara fakta satu dan fakta lain secara kronologis agar membentuk kesatuan fakta yang sistematis, logis, rasional, dan faktual dengan berdasarkan pada aspek pembahasan yaitu mengenai Peranan Haji Sulong dalam Memperjuangkan Otomomi Khusus Patani Thailand Selatan (1947- 1954).

3.4 Historiografi

Langkah terakhir dalam penelitian ini adalah historiografis, dalam tahap ini peneliti berperan untuk merekonstruksi tulisan secara analitis, kronologis, dan sistematis cerita dari masa lampau berdasarkan data yang diperoleh melalui langkah-langkah penelitian sebelumnya (Gottscalk, 1986: 32). Penyajian hasil penelitian ini dituangkan dalam bentuk karya ilmiah skripsi dengan sistematika penulisan terdiri atas 7 bab. Bab 1. Menyangkut perihal pendahuluan yang berisi latar belakang, penegasan pengertian judul, ruang lingkup permasalahan, rumusan masalah, tujuang penelitian, dan manfaat penelitian. Bab 2. berisi tentang kajian hasil penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan Peranan Haji Sulong dalam Memperjuangkan Otomomi Khusus Patani Thailand Selatan (1947-1954). Kajian tersebut sebagai landasan teori dan kerangka berpikir yang digunakan oleh penulis. Dalam tinjauan pustaka ini juga memaparkan pendekatan dan teori yang digunakan dalam menganalisis permasalahan. Bab 3. menyajikan metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah dengan prosedur atau langkah-langkah heuristik, kritik, intepretasi dan historiografi. Bab 4. berisi pembahasa mengenai Apa yang melatarbelakangi Perjuangan Haji Sulong dalam Memperjuangkan Otomomi Khusus Patani. Bab 5. berisi pembahasa mengenai usaha-usaha dan perjuangan

Haji Sulong dalam Memperjuangkan Otomomi Khusus Patani. Bab6. berisi pembahasa mengenai hasil perjuangan Haji Sulong dalam Memperjuangkan Otomomi Khusus Patani. Bab 7. Penutup, berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban secara ringkas terkait dengan permasalahan yang peneliti ungkapkan terkait dengan pertanyaan yang terdapat pada bab 1. Sedang saran akan peneliti sampaikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan Skripsi ini



BAB 5. USAHA-USAHA DAN PERJUANGAN HAJI SULONG DALAM MEMPEJUANGKAN OTONOMI KHUSUS PATANI

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai Usaha-usaha dan Perjuangan Haji Sulong dalam Mempejuangkan Otonomi Khusus Patani Thailand Selatan. Hal-hal yang akan dibahas adalah: (1) pendirian lembaga pendidikan dan politik; (2) perjuangan menuntut otonomi khusus melalui tuntutan 7 Perkara; (3) Reaksi Terhadap Perjuangan Haji Sulong.

5.1 Pendirian Lembaga Pendidikan dan Politik

keadaan masyarakat Patani sedang mengalami konflik dengan pemerintah Thai, maka dianugerah oleh Ilahi seorang tokoh yang bernama Haji Sulong. Haji Sulong adalah seorang tokoh ulama Patani yang memimpin masyarakat Patani dalam menghadapi dasar kebudayaan (*Rathaniyum*), yang diciptakan oleh Perdana Menteri Phibul Songgram, sehingga Haji Sulong terkenal, Haji Sulong dianggap sebagai Bapak Perjuangan Patani. Haji Sulong adalah termasuk golongan ulama yang terlibat dalam politik dan menentang keras terhadap campur tangan dengan pemerintah Thai dalam urusan kultural, Kemelayuan dan agama.

Sebelum Haji Sulong terlibat dalam masalah politik di negaranya, Haji Sulong adalah seorang guru pengajar dengan mendirikan sebuah Madrasah Al-Maafif al-Wathoniyah dan sebagai seorang ulama dalam ilmu tafsir dan ilmu Ushuluddin. Namun tidak berjalan lama, Madrasah yang didirikan oleh Haji Sulong tersebut kemudian ditutup oleh pemerintah Thai karena menduga dan berbahaya dan mempunyai maksud untuk mempersiapkan sebuah pemberontakan terhadap pemerintah Thai. Akhirnya selain beliau melaksanakan dakwah agama juga terlibat dalam masalah politik.

5.1.1 Pendirian Lembaga Pendidikan

Pesantren yang terdapat di Thailand tertumpu di Selatan Thailand, khususnya Patani, Yala dan Narathiwat. Yang paling banyak di Patani. Disana

disebutkan Pondok (Pesantran). Namun Pondok ini berfungsi sebagai insitusi pengajian agama tradisional, bahwa Thailand Selatan terutama Patani adalah pusat kegemilangan tamadun Islam dimana di Patani terletak pusat-pusat pengajian agama yang sangat terkenal. Pondok Tradisional Patani mempunyai sejarah yang sangat panjang. Masyarakat Melayu Patani mengklaim, pondok merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Nusantara, meskipun sumber-sumber sejarah secara umumnya menyebutkan, Islam datang dan berkembang di wilayah Patani pada abad ke-16. Terlepas dari kondisi itu, pondok Patani mengirimkan lulusan terbaiknya ke Haramayn yang kemudian menjadi ulama besar seperti Daud bin Abdullah al-Patani (abad ke-19), Ahmad bin Muhammad Zayn al-Patani, dan Zayn al-Abidin bin Muhammad al-Patani (abad 20) (Nurdi, 2010: 19). Mereka juga punya pondok sebagai asas untuk memainkan peranan sebagai pendakwah dalam menyebarkan syiar Islam sendiri.

Awal tahun kepulauan Haji Sulong, Haji Sulong membangun sebuah Madrasah, Madrasah al-Ma'arif al-Wathoniah. Menurut keterangan yang sempat diperoleh, sekolah ini adalah sekolah agama yang pertama sepertinya pernah didirikan di Patani. Walaupun demikian, masyarakat Patani yang pada waktu itu, malah sampai sekarang pun, yang lebih mengenal institusi "Pondok" sebagai tempat belajar agama, menerima baik penubuhan sekolah ini (Fathy, 2001: 83).

Madrasah ini merupakan sekolah agama pertama di Patani. Struktur organisasi dan disiplin pembelajaran yang teratur. Disini pelajar-pelajar diperkenalkan dengan sistem berkelas, sukatan pelajaran dan pelajar pula menjalani latihan berbaris yang kemas dan bersemangat (Zaman, 1996: 8). Para pemerhati beranggapan bahwa ada maksud lain bagi Haji Sulong dibalik pembaharuan dalam sistem dan corak pendidikan yang diperkenalkan kepada masyarakat Patani ini. Keadaan ini menjadi lebih dipahami apabila mengingat adanya kalimat al-Wathoniah, yang bermaksud "Kebangsaan" pada papan tanda nama sekolah ini. Meskipun mendapat sambutan baik daripada masyarakat, tetapi sekolah ini ditakdirkan tidak berusia lama. Setelah berjalan antara 2 hingga 3 tahun, sekolah ini menerima perintah penutupan dari pihak berkuasa kerajaan Thai

yang sangat merasa curiga atas sambutan dan perkembangannya (Fathy, 1994: 83).

5.1.2 Pendirian Lembaga Politik

Tidak lama setelah Phibul menjadi perdana menteri dan melancarkan semboyan Thai Rathaniyumnya, Haji Sulong mendirikan al-Hai'ah al-Tanfiziah li al-Ahkam al-Shar'iyah (Lembaga Pelaksanaan Hukum Syari'ah) pada tahun 1939. Tujuannya ialah untuk mendidik masyarakat Patani agar memahami hukum agama secara tepat. Hal ini dilakukan sebagai upaya tandingan terhadap kegiatan pemerintah Siam yang ingin men-Siamkan orang Melayu dan menodai kesucian ajaran agamanya; keduanya termasuk dalam agenda Pan Thai atau Thai Raya yang didalangi oleh Phibul. Sebelas orang dilantik untuk menjadi pengurus dalam lembaga ini, diantaranya ialah Haji Mat Pauh, Haji Hasan Mak Enggol, Haji Abd. Majid Embong (Chaok), Tok Guru Bermin dan lain-lain. Sampai sejauh ini belum diketahui sejauh manakah peranan yang telah dimainkan oleh Lembaga ini sehubungan dengan slogan Thai Rathaniyum ini (Fathy, 2001:84). Sudah dipahami bahwa kedatangan Haji Sulong, pada awalnya, tidak ingin terlibat dengan perpolitikan di Patani. Kondisi ketidakadilanlah yang membuat Haji Sulong tidak sanggup untuk berdiam diri, Haji Sulong pun mulai berpartisipasi dalam bidang politik.

Pada tahun 1944, Phibul terlibat dalam kepengurusan Hakim Agama (Qadhi) dan membubarkan undang-undang keluarga serta pembagian harta waris (faraidh) Islam. Kemudian Phibul menggantikannya dengan undang-undang sipil kerajaan. Pembagian harta waris pada hukum Islam untuk bagian perempuan adalah setengah dari bagian laki-laki. Sementara dalam undang-undang sipil kerajaan pembagian harta waris bagi perempuan dan laki-laki adalah sama. Setiap ada masalah yang menyangkut kedua aturan agama tersebut – undang-undang keluarga dan pembagian harta waris – maka akan diputuskan berdasar undang-undang sipil kerajaan. Masyarakat Melayu Patani Merasa tidak puas dengan keadaan seperti ini, lalu mendirikan Majlis-Majlis Agama Islam di keempat wilayah selatan: Patani, Yala, Narathiwat dan Setun. Di Patani, Haji Sulong

terpilih menjadi Ketua, sementara di Yala, yang terpilih sebagai ketua adalah Haji Mustafa Awang, di Narathiwat terpilihlah Haji Daud Mat Diah dan di Setun adalah Haji Abdullah Lang Putih (kemudian Anggota Perlemen Setun dan Menteri Kesehatan Thai) (Fathy, 1994: 86).

Meski tidak diketahui dengan pasti siapa pencetus ide dibalik lahirnya majlis-majlis ini, kehadiran lembaga-lembaga ini diharapkan menjadi penghubung antara rakyat Melayu Patani dengan Bangkok tanpa terikat dengan birokrasi yang rumit dan kepentingan golongan. Dalam keadaan-keadaan tertentu, majlis menjadi wadah bagi orang-orang Melayu Islam Patani, diempati wilayah untuk menyampaikan suara dan cita-cita kepada kerajaan menyangkut setiap permasalahan umat Melayu Patani.

Haji Sulong termasuk golongan ulama yang mencurigai keterlibatan kerajaan dalam urusan agama. Haji Sulong berpendapat bahwa campur tangan politik dalam soal-soal hukum agama sejak masa Raja Chulalongkorn telah merusak kemurnian dan kesucian Islam. Terlepas dari ada tidaknya kerjasama antara orang Islam dengan kerajaan, Haji Sulong berpendapat bahwa hukum Islam seharusnya diurus oleh lembaga kehakiman Islam tersendiri (Fathy, 2001: 85).

Pada 14 Februari 1944, Tengku Abd. Jalal bin Tengku Abdul Muttalib – Ahli Parlemen Narathiwat – atas nama masyarakat Melayu, memberikan masukan terhadap pemerintah tentang slogan pemerintah yang dikhawatirkan mengancam kehidupan beragama dan berbudaya masyarakat Melayu. Namun pemerintah tidak menghiraukan masukan tersebut dengan tetap melakukan upaya men-Siamkan masyarakat Melayu Patani.

Setelah Phibul jatuh pada bulan Juli 1944, barulah tekanan-tekanan ini – upaya pensiamisasian – sedikit berkurang. Pemerintahan baru Thai (pada Juni 1946) memberikan kesempatan bagi orang Melayu Patani untuk turut mengirimkan wakil di pemerintahan. Pridi dan Kuang Aphiwong merupakan dua orang yang diutus pemerintah untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Selatan. Hasilnya adalah pengembalian otonomi hukum Islam, seperti sebelum kekuasaan Phibul, diserahkan kepada masyarakat Melayu. Pada saat bersamaan, orang-orang Melayu membentuk sebuah kelompok yang bertujuan untuk

mendesak kerajaan agar memenuhi beberapa tuntutan, antara lain penggunaan undang-undang Islam secara lebih meluas dan taraf kedudukan yang lebih baik bagi orang-orang Melayu Patani, sekurang-kurangnya di empat wilayah Selatan (Fathy, 1994: 88).

Sedikit kelonggaran ini tidak dapat dinikmati dalam waktu yang lama. Pada 8 November 1947, Phibul kembali berkuasa setelah melancarkan satu kudeta yang memaksa Pridi lari keluar negeri. Akibatnya adalah lembaga yang baru saja dibentuk – oleh Pridi – tidak difungsikan. Phibul kembali turut campur dalam urusan agama dan budaya masyarakat Melayu. Pemimpin-pemimpin Melayupun melayangkan permohonan kepada pemerintahan Inggris di London agar tidak mensahkan rezim Phibul dan memohon supaya terlibat lebih dalam tentang kepengurusan masalah Patani.

Dalam banyak hal Pridi dapat dianggap sebagai Perdana Menteri yang sangat toleran. Hubungan eratnya dengan Chularajamontri (Shaikhul Islam) Haji Shamsuddin telah menyebabkan beliau sangat toleran dalam menangani masalah-masalah orang Melayu di selatan. Kepemimpinan beliau menjadi tumpuan harapan bagi golongan Melayu Patani untuk memperoleh otonomi politik dan budaya dalam sebuah kemaharajaan Budha yang sangat konservatif di dunia. Tidak lama setelah memegang jabatan pada bulan Maret 1946, Pridi membujuk Raja Ananda Mahidol untuk memberikan bantuan dari kas kerajaan demi memajukan kesejahteraan agama dan pendidikan orang Islam.

5.2 Perjuangan Menuntut Otonomi Khusus Melalui Tuntutan 7 Perkara

Tanggal 1 April 1947, diadakan pertemuan di antara pemimpin-pemimpin masyarakat Melayu wilayah Selatan di Patani. Hasil dari pertemuan itu adalah kesepakatan untuk menyerahkan sebuah memorandum yang mengandungi beberapa tuntutan dari masyarakat Melayu di Selatan kepada wakil-wakil kerajaan Thai sewaktu mereka melakukan kunjungan ke Patani. Pada tanggal 24 Agustus 1947, Haji Sulong (Ketua Majlis Agama Islam Patani) dan Wan Uthman Wan Ahmad (selaku Pengurus Persekutuan Semangat Patani) secara resmi menyerahkan memorandum tersebut kepada 7 orang utusan pemerintah yang

berkunjung ke Patani. Beberapa bulan sebelumnya, tepatnya pada tanggal 3 April 1947, Haji Sulong mengirimkan secara langsung memorandum tersebut kepada Perdana Menteri (Fathy, 1994: 83)

Memorandum ini berisi tuntutan tujuh perkara yang mengarah pada pemberian daerah Otonomi Khusus di empat wilayah Selatan. Tujuh tuntutan ini yang nantinya dikenal dengan nama "Tujuh Tuntutan Haji Sulong" meliputi:

1. Pengangkatan seorang komisaris tinggi untuk memerintah Daerah Patani Raya dengan wewenang penuh untuk memecat, menskors, atau mengganti semua pejabat pemerintah yang bekerja di daerah itu; orang itu harus putra daerah dan dipilih oleh rakyat dalam suatu pemilihan umum yang diadakan khusus untuk tujuan itu.
2. Delapan puluh persen (80%) dari pejabat pemerintah di daerah itu harus Melayu Patani (untuk mencerminkan rasio penduduk).
3. Bahasa Melayu dan Bahasa Siam akan menjadi bahasa resmi.
4. Bahasa Melayu akan diajarkan di sekolah dasar.
5. Hukum Islam akan diberlakukan di empat wilayah – Patani, Yala, Narathiwat, dan Setun – dengan pengadilan-pengadilan Islam yang terpisah dan bebas dari sistem peradilan pemerintah.
6. Semua hasil pajak di empat wilayah – Patani, Yala, Narathiwat, dan Setun akan digunakan untuk kesejahteraan rakyat selatan.
7. Majelis Agama Islam propinsi akan diberi wewenang penuh atas perundang-undangan menurut hukum Islam mengenai semua urusan Melayu dan kebudayaan Melayu, dibawah wewenang Komisaris Tinggi seperti yang disebut dalam No. 1 (Pitsuwan, 1989: 117).

Dari tujuh tuntutan tersebut, tidak ada satu pun tuntutan untuk merdeka atau memisahkan diri, karena tampaknya mereka masih berharap akan ada negosiasi yang memungkinkan mereka mencapai kompromi dengan hak-hak tertentu yang bisa dicapai oleh Melayu Muslim di empat provinsi yaitu: Patani, Yala, Narathiwat dan Setul. Pada saat itu juga pemerintahan pusat membuka dialog dan pendekatan persuasif terhadap tuntutan umat Islam di Patani. Tuntutan tujuh itu lebih mendekati sebagai daerah Otonomi Khusus, misalnya

mereka menuntut pemilihan gubernur secara langsung mengingat selama ini gubernur ditunjuk langsung oleh Perdana Menteri dan seringkali berasal dari kalangan orang Siam non- Muslim dan tidak mengerti bahasa Melayu.

Orang Melayu juga menuntut rekrutmen pegawai negeri 80% dari Muslim Melayu atau pribumi di empat provinsi tersebut, karena selama ini pegawai negeri lebih banyak diambilkan dari daerah lain yang seringkali tidak bisa berbahasa Melayu dan senantiasa memandang rendah terhadap penduduk Muslim Melayu. Mereka juga menuntut agar penggunaan pajak untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat lokal, karena selama ini hasil pajak dibawa ke pusat dan hanya sedikit dikembalikan ke daerah. Daerah Patani adalah daerah yang sangat subur dan makmur, sementara rakyatnya sangat miskin. Tuntutan lain adalah agar bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa resmi di sekolah dan tempat kerja berdampingan dengan bahasa Thai, serta dikembalikan pengadilan agama yang mandiri dan bukan hanya sebagian dari pengadilan umum seksi agama. Namun, sebelum terjadinya kesepakatan dalam negosiasi antara masyarakat dan Perwakilan dari Patani yang dipimpin oleh Haji Sulong dengan pemerintahan pusat (Suaedy, 2012: 101).

Haji Sulong tidak menginginkan pembentukan sebuah negara merdeka, yang diharapkan adalah daerah Otonomi Khusus agar wilayah Selatan dapat mempertahankan identitas serta sifat-sifat khasnya. Keinginan ini seolah menjadi syarat minimal yang harus terpenuhi karena golongan Melayu Patani akan tetap mengupayakan kelangsungan cara hidup tradisionalnya serta menjaga kemurnian agama yang mereka anut.

Semula, ada optimis dalam benak Haji Sulong mengenai tuntutan-tuntutan ini agar dapat dipertimbangkan oleh Bangkok, meski tidak seluruhnya. Perdana Menteri Pridi yang diketahui terpengaruh dengan bentuk 'Federalisme Switzerland', diyakini bersedia memberikan otonomi kebudayaan bagi etnik Melayu dalam lingkungan bangsa Thai. "Pridi lah yang oleh Haji Sulong sebagai pemimpin defactor kepada komunitas Melayu, begitu diharapkan untuk memberikan dukungan politik kepada perjuangan untuk memperoleh otonomi politik" (Fathy, 1994: 91).

Sayangnya harapan-harapan ini segera buyar dan sirna ketika Phibun kembali berkuasa pada tanggal 8 November 1947, tidak lama setelah tuntutan rakyat diserahkan. Meski Pridi telah pergi, Haji Sulong yang sudah terlibat dalam gerakan politik, maka tidak dapat menghentikan langkahnya demi memperjuangkan otonomi politik yang sudah berjalan. Belakangan, setelah peristiwa ini, Haji Sulong banyak terlibat dengan Tengku Mahmud Muhyiddin, putera Raja Patani yang terakhir, di Kelantan, dan ini juga yang menjadi sebab bagi penangkapan kali pertama Haji Sulong pada hari Jum'at tanggal 16 Januari 1948.

Haji Sulong dibebaskan empat tahun kemudian yaitu pada tahun 1952. Selama dalam tahanan di Ligor, Haji Sulong menulis "Gugusan Chahaya Keselamatan" yang kemudian diterbitkan oleh anaknya, Haji Mohd Amin pada tahun 1958, tetapi segera dilarang – penerbitan dan peredaran buku tersebut – oleh kerajaan. Setelah dibebaskan, Haji Sulong kembali ke Patani dan meneruskan pekerjaan awalnya yaitu menjadi "Tok Guru" (Fathy, 1994: 91).

GEMPAR atau lengkapnya Gabungan Melayu Patani Raya, didirikan di kota Bharu, Kelantan pada 5 Maret 1948 (bersamaan 24 Rabi'ul Akhir 1367), tidak lama setelah Haji Sulong ditangkap. Meskipun ada selentingan kabar yang menyatakan bahwa ide pendirian badan ini dipelopori oleh PKMM (Partai Kebangsaan Melayu Malaya), namun sangat jelas terlihat bahwa pendirian badan ini sangatlah tergesa-gesa dan lebih merupakan reaksi spontan terhadap peristiwa penangkapan Haji Sulong.

Menurut Pengamat, di pagi hari tepatnya pada hari Jum'at, tanggal 11 Maret 1948, pendirian GEMPAR telah disahkan di Madrasah Muhammadiyah, Majlis Agama Islam dan Istiadat Melayu Kelantan, dengan dihadiri oleh sekitar 200 orang Melayu Patani serta orang-orang Kelantan dan lain-lain lagi. Setidaknya ada tiga tujuan utama dari pendirian GEMPAR:

1. Hendak menyatukan empat wilayah yaitu Patani, Yala, Naratiwat dan Setun sebagai satu Negara Melayu Patani dan melepaskan kaum Melayu yang ada di dalam empat wilayah tersebut dari ketidak-adilan dan ketertindasan pemerintahan Thai;

2. Mengadakan pemerintahan di dalam negeri yang sesuai dengan semangat kebangsaan Melayu dan adat-istiadat Melayu Patani;
3. Mempertinggi taraf kehidupan bangsa Melayu agar terwujud Kemanusiaan, Keadilan, Kebebasan dalam memperoleh ilmu pelajaran yang sesuai dengan kondisi kekinian (Malek, 1999: 102).

5.3 Reaksi Terhadap Perjuangan Haji Sulong

5.3.1. Tanggapan dari pemerintah

Ketegangan yang semakin meningkat di keempat-empat wilayah di Selatan Thai Setelah penahanan Tuan Guru Haji Sulong serta kritikan-kritikan tajam dari Tanah Melayu berhubung dengan dasar kerajaan Thai terhadap orang-orang Melayu itu telah menimbulkan keresahan kepada kerajaan Aphaiwong dan memaksanya bertindak bagi mengawal keadaan itu. Kerajaan Thai telah menghantar Phraya Ramajbhakdi, Ketua pengarah Kementerian Dalam Negeri, untuk membuat penyiasatan. Dalam satu kenyataan yang dikeluarkannya, Menteri Dalam Negeri menafikan bahawa kekacauan besar telah berlaku di keempat-empat wilayah di selatan, seperti yang didakwa oleh akhbar-akhbar dan pertubuhan politik Semenanjung Tanah Melayu (Mahmud, 2006: 84).

Beliau mengakui bahawa beberapa kekacauan kecil telah berlaku di Selatan Thai. Bagaimanapun, tegasnya lagi, kekacauan itu dicituskan oleh kelompok minoriti untuk kepentingan diri sendiri. Beliau menyalahkan akhbar-akhbar Tanah Melayu kerana secara sengaja membesar-besarkan keadaan di Selatan Thai.

Kenyataan Menteri Dalam Negeri itu telah dibantah oleh Tengku Abdul Kadir Petra, salah seorang ahli Jawatankuasa GEMPAR. Dalam sepucuk kawat kepada Perdana Menteri Khuang Aphaiwong, Tengku Abdul Kadir Petra menegaskan bahawa: Kenyataan ini tidak benar dan menjejaskan maruah dan integriti kami. Kami mencabar pihak tuan mengemukakan bukti kepada dunia dengan mengadakan pungutan suara dengan dipengerusikan oleh pegawai-pegawai Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu tetapi kehadiran pegawai tentera dan awam di kawasan yang hanya akan menakutkan penduduk yang tertindih itu.

Kenyataan Phraya Ramabhakdi itu juga telah ditakutkan oleh Senator Nai Banchong Sricaroon atau Haji Wahab dalam perbahasan di parlimen di Bangkok pada 5 Mac 1948. Inilah kali pertamanya isu Patani dibangkitkan dan dibahaskan di sidang parlimen. Senator Banchong menyalahkan pegawai-pegawai tadbir Thai di atas kekacauan di wilayah selatan. Para pegawai tersebut bersikap keras dan menindas penduduk-penduduk tempatan sehingga mencetuskan perasaan tidak puas hati orang-orang Melayu terhadap kerajaan. Beliau menganggap pegawai-pegawai tersebut "tidak lebih daripada pegganas". Penduduk-penduduk tempatan telah ditindas dan diperas, harta-benda mereka dirampas secara paksa, rumah mereka dibakar hangus; manakala bahasa, adat-resam dan agama mereka dicabuli. Tidak ada seorang pun daripada mereka berani untuk mengadukan kejadian ini kepada pihak kerajaan kerana bimbang pegawai-pegawai berkenaan membalas dendam (Mahmud, 2006: 85).

Beliau menambah: Saya tahu bahawa saya dikehendaki membuktikan dakwaan saya itu tetapi sebagai seorang Melayu dan anggota Jawatankuasa Majlis Islam Pusat, menjadi tanggungjawab saya untuk memberitahu Kementerian dalam Negeri tentang kedudukan sebenar bagi membolehkan mencari jalan untuk mengatasi keadaan itu. Bila saya diberitahu tentang keadaan di Selatan, adalah sukar bagi saya untuk mempercayainya. Kementerian Dalam Negeri tidak mengambil apa-apa tindakan untuk mengatasi bila saya mengemukakan kepadanya. Setengah daripada mereka yang memberi laporan itu kepada saya telah dibunuh dalam keadaan yang penuh misteri, setengahnya pula melarikan diri ke Tanah Melayu dan menyebarkan berita bahawa penduduk-penduduk di Patani telah diberi layanan buruk oleh kerajaan penjajah Thai. Ini bukanlah persoalan gerakan pemisahan atau rusuhan. Ini adalah soal ketidakadilan di pihak pegawai-pegawai kerajaan.

Memang benar sesuatu mestilah dibuat bagi mengatasi masalah itu, tetapi itu tidak memadai. Akibat daripada dakwaan ini, Nai Banchong Sricharoon mendesak kerajaan supaya mengambil langkah-langkah segera dan positif bagi mengatasi masalah yang dikemukakan itu. Beliau juga meminta kerajaan mengisi jawatan Chularajamontri yang telah dikosongkan oleh Chaem Promyong. Khuang

Aphaiwong, dalam jawabannya, mengakui bahawa kekacauan sememangnya wujud di wilayah-wilayah Selatan Thai, Beliau memberi jaminan bahawa sebuah jawatan kuasa khas akan dibentuk oleh kerajaan bagi mengkaji punca kekacauan di wilayah tersebut. Menjawab dakwaan Nai Banchong tentang kezaliman pada pegawai kerajaan, beliau menegaskan bahawa kerajaan perlu membuat penyiasatan rapi sebelum sebarang tindakan diambil. Selain itu, beliau berjanji akan memperkenalkan reformasi di keempat-empat wilayah tersebut bagi mengatasi perasaan tidak puas hati penduduk-penduduk Melayu. Beliau memberi jaminan bahawa kebebasan beragama akan dihormati dan bahasa Melayu akan dibenarkan untuk diajar di sekolah-sekolah kerajaan. Beliau juga berjanji akan menukar pegawai-pegawai yang mengambil rasuah, di samping melantik seorang Melayu yang dihormati sebagai Chularajamontri bagi menasihati kerajaan dalam hal-ehwal agama Islam (Mahmud, 2006: 86).

Akibat daripada itu, Khuang Aphaiwong telah melantik Seni Pamoj, Menteri Pelajaran, untuk mengetuai Jawatankuasa Penyiasat bagi menyiasat keadaan di Selatan Thai. Beliau juga bercadang untuk mengadakan rundingan dengan Tengku Mahmud Mahyideen jika masa mengizinkan. GEMPAR, dalam ulasannya mengenai pembentukan Jawatankuasa Penyiasat, meragui sama ada jawatankuasa itu akan dapat memperoleh fakta-fakta sebenar daripada penduduk-penduduk tempatan mengenai keadaan di Patani.

Pengalaman yang lalu telah menunjukkan bahawa sebelum ketibaan satu-satu Jawatan kuasa penyiasat seumpama itu, penduduk-penduduk tempatan telah ditekan dan diugut oleh pihak polis Thai tempatan supaya berbohong. Dengan sebab itulah GEMPAR dengan lantang menganggap pembentukan jawatan kuasa penyiasat itu sebagai satu propaganda murah Kerajaan Thai. GEMPAR mengingatkan orang-orang Melayu supaya berhati-hati agar tidak tertipu dengan helah dan muslihat pihak Thai. Sehubungan isu tersebut, antara lain GEMPAR menegaskan, Rakyat adalah diingatkan bahawa ini (perlantikan Suruhanjaya Khas) adalah tindak-tanduk diplomatik yang licin di pihak kerajaan Thai bagi tujuan mengambil hati orang-orang Melayu. Tawaran itu hendaklah ditolak oleh

kerana apa yang kita tuntut ialah kebebasan beragama. Kita akan melayan mereka yang menerima tawaran itu sebagai pengkhianat bangsa (Mahmud, 2006: 86).

Bagaimanapun, sebelum sempat Jawatan kuasa Penyiasat menjalankan penyiasatannya, Khuang Aphaiwong telah diminta oleh pihak tentera yang diketuai oleh Jeneral Phin Chunhawan supaya meletakkan jawatan dengan alasan bahawa kerajaan pimpinannya telah gagal untuk mengatasi masalah dalam negeri. Khuang Aphaiwong pada awalnya enggan tunduk kepada tuntutan pihak tentera itu tetapi beliau akhirnya bersetuju meletakkan jawatan itu. Pibul Songgram, Ketua Turus Angkatan Tentera Darat, telah dilantik sebagai Perdana Menteri oleh Majlis Pemangku Raja. Dengan perlantikan ini, Pibul Songgram telah menjadi Perdana Menteri Thai bagi kali kedua.

5.3.2. Tanggapan dari Masyarakat Melayu Patani

Apabila berita penangkapan Haji Sulong tersebar luas, maka timbullah reaksi dari pada masyarakat Melayu didalam dan diluar negeri. Pada 19 Januari 1948, terjadilah demonstrasi di hadapan balai polis teluban, tempat penahanan Haji Sulong. Para hadirin yang datang berkumpul menuntut ikat jamin dibenarkan bagi membebaskan Haji Sulong dari pada penjara. Tetapi ternyata tuntutan itu tidak mendapat layanan. Haji Sulong di pindahkan ketahanan di Patani. Pada 22 Januari 1948, terjadi lagi perhimpunan dan kali ini pemimpin agama yang terdiri dari pada To'Guru dan To'Imam, berjumlah ratusan orang datang berkumpul di pejabat Majlis Agama Islam wilayah Patani menyatakan kesetiaan dan kebimbangan terhadap pemimpin mereka yang sedang berada di dalam tahanan. Reaksi masyarakat Melayu ini menyebabkan kerajaan merasa bimbang dan khawatir terhadap perkembangan ini. Lantaran itu, pembicaraan hal Haji Sulong itu di pindahkan ke Mahkamah wilayah Nakhonsitamarat (legor) (Chapakia, 2002: 112).

Walau bagaimanapun, ada di kalangan pemimpin masyarakat Melayu yang berada dalam negeri masih berpandangan bahwa masalah di Selatan perlu diselesaikan secara damai. Antara langkahnya ialah meneruskan rancangan rundingan secara langsung antara Tengku Mahmud Mahyiddin dengan kerajaan

pusat di Bangkok. Pertemuan secara tidak resmi berlaku antara Tengku Mahmud Mahyiddin dengan Ci'Abdullah Long Putih bertempat di Kota Baru, Kelantan. Dalam pertemuan ini telah dicadangkan supaya Tengku Mahmud Mahyiddin menjadi wakil masyarakat Melayu Patani di Selatan Thai untuk berunding dengan pihak kerajaan pusat di Bangkok. Pada dasarnya, cadangan itu di terima oleh Tengku Mahmud Mahyiddin, tetapi beliau mengemukakan tiga syarat utama yaitu:

1. Hendak dibebaskan Haji Sulong dari pada tahanan dan di benarkan mengambil bagian dalam rundingannya.
2. Hendak di panggil kembali semua ketua Melayu yang telah berhijrah dari Selatan Siam.
3. Kerajaan Siam memberitahu kepada wakil kuasa besar di Bangkok tentang adanya rundingan itu (Chapakia, 2002: 113).

Tetapi syarat tersebut tidak di terima oleh kerajaan Thai. Dengan itu, rancangan perundingan berhenti. Sebagai langkah meneruskan politik menantang kerajaan Thai, Tengku Mahmud Mahyiddin mengambil tindakan berhubungan dan bekerja sama dengan para wartawan asing seperti Miss Barbara Wittinghem Jones dalam menyiarkan masalah Patani kepada masyarakat antara bangsa. Keadaan ini membuatkan suasana di Selatan makin tegang. Untuk menghadapi suasana ini, pihak kerajaan telah bertindak menghantar polis dan tentara ke Selatan dengan jumlah yang banyak sebagai langkah berjaga-jaga terhadap sebarang kemungkinan. Masyarakat yang berada di luar negeri telah mengambil beberapa tindakan sebagai reaksi terhadap penangkapan Haji Sulong. Bahkan ini di jadikan sebagai bukti kezaliman kerajaan yang bertindak menangkap Ulama', hal ini disiarkan kepada badan dunia dan masyarakat antar bangsa, khususnya di kalangan Negara Islam. Tujuan utamanya adalah untuk menarik perhatian dunia terhadap politik di Selatan dan mengharapkan supaya kerajaan Thai memberi kebebasan kepada masyarakat Melayu.

Sebagai lanjutan dari pada perkembangan itu, pada pertengahan Februari 1948, masyarakat Melayu Selatan yang berada di tanah Melayu telah mengambil

tindakan menubuhkan badan perjuangan yang di namakan Gabungan Melayu Patani Raya atau ringkas GAMPAR. Tujuan utama menubuhan tersebut ialah:

1. Menyatukan masyarakat Melayu yang berada di Selatan Thai dan tanah Melayu.
2. Membentuk hubungan erat di kalangan masyarakat Melayu yang berada diluar negeri dengan yang berada di dalam negeri serta meningkatkan kehidupan yang bermutu.
3. Mewujudkan kerja sama dan tolong menolong antara satu dengan yang lain.
4. Memajukan pendidikan dan menghidupkan budaya Melayu di Thailand Selatan (Malek, 1993: 206).

Walaupun GAMPAR sebagai badan politik, tetapi perjuangannya tidak bertujuan untuk mendapatkan kemerdekaan politik secara mutlak. Ini dapat dilihat pada rangkaian pertama dalam manifestasinya yang berbunyi:

Adalah perjuangan anak Melayu yang sedang di bawah pemerintahan Siam itu adalah semata-mata berdasarkan Keimanan, Keadilan dan Kemanusiaan, bukan pula kita bertakabbur hendak berdiri sendiri. Bahkan dengan segala tujuan dan dasar undang-undang tubuh (Rattamanun) kerajaan Siam sendiri yang mengaku kepada segala hak kerakyatan dan Demokrasi sebagai mana yang di pahami oleh sekalian penduduk dunia ini maka terpaksa kita mengambil langkah yang tersebut di bawah ini. Peranan penting yang di mainkan oleh GAMPAR ialah membuat hubungan dengan badan perhubungan dunia dan kuasa besar serta memberikan penerangan tentang keganasan para pegawai kerajaan Thai untuk mengubah sikap dan dasarnya terhadap masyarakat Islam di selatan (Chapakia, 2002: 116).

BAB 6. HASIL PERJUANGAN HAJI SULONG DALAM MEMPERJUANGKAN OTONOMI KHUSUS PATANI

Pada bab ini penulis akan membahaskan mengenai Hasil Perjuangan Haji Sulong dalam Memperjuangkan Otonomi Khusus Patani Thailand Selatan. Hal-hal yang akan dibahas adalah: (1) respon pemerintahan terhadap tuntutan 7 Perkata ; (2) perjuangan rakyat setelah Haji Sulong wafat; (3) Karya-karya Haji Sulong.

6.1 Respon pemerintahan terhadap Tuntutan 7 Perkata

Pada masa pemerintahan Nai kuang, kerajaan Siam telah mendirikan sebuah jawatan kuasa pemeriksaan atau penyiasat hal ihwal di empat provinsi Thailand Selatan yaitu: Patani, Yala, Narathiwat dan Setul. Sebuah jawatan kuasa itu termasuklah Haji Shamsuddin Mustapha dan Encik Abdullah Lang Puteh yang kemudiannya menjadi wakil rakyat di Setul. Jawatan kuasa ini diketuai oleh Nai Prakob Bunyaprasop yaitu Gubernur Bahagian Selatan. Pada awal April 1947, telah tersiar dalam akhbar-akhbar tempatan bahwa pemeriksaan atau penyiasat akan melawat atau mengunjungi provinsi Thailand Selatan termasuk Patani.

Gubernur Patani, Nai Wiwik telah memaklumkan kepada Haji Sulong bahwa rombongan tersebut akan menemui Haji Sulong, pada 3 April 1947 dimana hasrat dan cadangan dari pihak Melayu Islam Patani boleh dikemukakan. Akibat dari itu Haji Sulong membuatkan mjlis perjumpaan dengan ahli jawatan kuasa MAIP, Imam, Khatib dan bilal serta keamanan di seluruh Patani yang jumlahnya kira-kiranya 400 orang, pada 1 April rumusan dari perbincangan itu, pihak Haji Sulong membut keputusan untuk menuntut beberapa perkara yang dikenal sebagai Tuntutan Tujuh Perkara (Zaman, 1996: 17).

Pada 3 April 1947 sejumlah penyiasat dari Bangkok tiba di Patani. Jam 10.00 pagi, Haji Sulong di jemput untuk berbincang bertempat di Dewan Kerajaan Tempatan Patani, Haji Sulong membawa bersamanya tuntutan 7 perkara diiringi oleh jawatan kuasa MAIF dan 500 rakyat Patani. Dalam perjumpaan itu Haji

Sulong menyerahkan tuntutan rakyat Patani dan menjelaskan dua sebab penting mengapa tuntutan itu dibuat:

1. Rakyat Patani dalam keadaan tertindas oleh pegawai kerajaan Siam di mana siapa yang tidak bersetuju atau membantah di tangkap kemudian dibawa kesuatu tempat. Bila sampai separuh jalan lalu ditembak dengan alasan coba melarikan diri atau coba melawan. Peristiwa seperti itu telah meragut puluhan nyawa rakyat yang tidak bersalah. Penduduk tidak berani membuat laporan kepada pihak yang lebih kuasa karena mereka akan disiksa dengan lebih buruk lagi;
2. Berlakunya penipuan dan pemerasan harta rakyat oleh pegawai atasan serta membunuh siapa yang melawan (Zaman, 1996: 18).

Rombongan jawatankuasa penyiasat berjanji akan menyampaikan surat permohonan 7 perkara itu kepada kerajaan Bangkok. Namun selama empat bulan tidak ada jawapan. Pada 9 Agustus 1947 melalui surat kementerian kehakiman Bangkok Bil. 5385/2490 jelas memberikan jawapan bahwa kerajaan Bangkok tidak menerima tuntutan untuk memisahkan mahkamah syariah dari mahkamah sivil dengan alasan ia mengubah perlembagaan negeri. Setelah mendapat jawapan itu, Haji Sulong bertindak balas menentang polisi kerajaan berkenaan pelantikan kadhi (Datuk Yutitam) dan mulai mengumpul kekuatan rakyat dan menyusun struktur politik.

Kerajaan Bangkok telah membuatkan satu peraturan bagi masyarakat Islam di Patani (Thailand Selatan) dengan, melantikan seorang pengadilan (Datuk Yutitam) menjadi kadi di provinsi yang berkenaan dan juga menjadi penasihat undang-undang sivil. Kerajaan hanya memberikan kekuasaan dalam hal-hal yang bersangkutan dengan pusaka dan nikah cerai saja, tidak diberikan kekuasaan sebagaimana hakim dalam hal ihwal Islam seluruhnya. Datuk Yutitam hanya boleh memberikan pandangan saja kepada hakim dan hakim kerajaan boleh menerima atau menolaknya, Haji Sulong tidak memuaskan (Mahmud, 2006: 72)

Kemudian Haji Sulong terus mendesak kerajaan Siam dengan tuntutan 7 perkara itu. Tentangan Haji Sulong dirasakan oleh kerajaan Thai, yang kemudian kerajaan Thai memberikan tawaran jawatan tersebut kepada Haji

Sulong, tetapi Haji Sulong tetap menolak sebagai usaha mendapatkan penyelesaian. Kerajaan Bangkok mengarahkan Gubernur Patani supaya mengadakan perbincangan dengan Haji Sulong. Mengikuti bersama hadir dalam perjumpaan di pejabat kerajaan itu, yaitu ulama-ulama dan imam-imam. Dalam perbincangan itu juga diadakan pemilihan semula jawatan kadi dimana Haji Sulong dipilih tanpa bantahan. Haji Sulong menerima perantaraan itu dengan syarat mahkamah syariah harus dipisahkan dari mahkamah sivil, syarat ini tidak dapat diterima oleh kerajaan Thai.

Akibat tuntutan 7 perkara tidak mendapat persejuaan dari kerajaan Thai, maka Haji Sulong menjalankan aktivitasnya di masjid dan pesantren-pesantren untuk menggerakkan dan menanamkan semangat patriotisme dikalangan rakyat Melayu Islam Patani demi menegakkan syariah Islam dan menuntut keadilan (Mahmud, 2006: 73). Akhir tahun 1947, di Patani berlaku haru hara dimana 200 buah rumah orang-orang Siam serta pos-pos polis dibakar di sekitar bandar Patani. Dan tersebar poster-poster anti Siam yang berbunyi “Hidup Melayu, Mampus Siam”

Pada 3 November 1947, tersebarlah berita yang menggemparkan melalui akhbar Straits Times di Singapura yang mendedah kezaliman kerajaan Siam terhadap rakyat Melayu Patani dan perbuatan perkosa keatas wanita-wanita Melayu Islam. Mulai dari saat itu kerajaan Siam secara terang-terang memusuhi Haji Sulong. Segala pergerakan Haji Sulong diawasi oleh kerajaan Thai dan aktivitiynya diintip. Kemuncak dari permusuhan ini ialah penangkapan Haji Sulong serta beberapa orang pemimpin Melayu Patani pada 16 Januari 1948. Peristiwa penangkapan ini dari catatan Haji Sulong melalui bukunya ‘Gugusan Cahaya Keselamatan’ yang beliau tulis semasa berada dalam tahanan penjara bangkuang di Bangkok (Zaman, 1996: 22).

Setelah mendapat kebebasan pada 15 Juni 1952M Haji Sulong kembali ke Patani dengan disambut lebih dari seribu orang rakyat Patani. Setelah kembali ke Patani Haji Sulong menyambung semula mengajar di bangunan Madrasah Al-Maarif Al-Wataniah. Pada hari beliau mengajar, Bandar Patani penuh sesak dengan manusia para pendengar di setiap penjuru. Sambil itu Haji Sulong terus

bergiat di dalam memperjuangkan nasib rakyat Patani. Pada waktu Haji Sulong sedang mengaja itu ramailah mata-mata gelap kerajaan Thai ikut beserta dalam pengajian serta mengitip setiap gegak-gerinya. Sungguhpun Haji Sulong mendapat kebebasan dari penjara, tetapi nama Haji Sulong masih tercatat di buku kerajaan.

Kebetulah pada tahun 1953, pihak Inggris telah mulai berunding untuk memberikan kemerdekaan Malaya. Hal ini telah menambahkan kecurigaan pihak kerajaan Thai terhadap kumpulan Haji Sulong. Akhirnya pada 24 Desember 1953, gubernur Patani mengeluarkan perintah untuk tidak membenarkan Haji Sulong mengajar lagi. Bagaimanapun setelah Haji Sulong membuat permohonan kepada Menteri dalam negeri larangan itu tarik kebal. Pihak gubernur Patani tidak memuaskan atas kegiatan Haji Sulong, karena gubernur Patani berpendapat bahwa kegiatan Haji Sulong itu tidak mengamankan Patani. Maka gubernur Patani bekerjasama dengan unit CID bagian 9 di Senggora yang diketuai oleh Mejar Boonlert Pricha, bertanggungjawab pemeriksaan Haji Sulong.

Akhir bulan Juli 1954 ketua polisi Patani menjemput Haji Sulong, Wan Othman Muhammad, Encik Ali Encik Wok dan Encik Ishak Yusof pergi ke balai polis Patani. Mereka berempat pergi berjumpa dengan ketua polis itu yang bernama Mejar Lek Kamnudngaam. Dalam perjumpaan itu, ketua polis Patani menjelaskan bahwa CID bagian 9 Senggora meminta mereka berempat menemuinya pada 10 Agustus 1954 dengan membawa gambar masing-masing dan hendak memberi tahu pihak polis Senggora terlebih dahulu secara telegram sebelum mereka pergi. Hari Jumaat 13 Agustus 1954 bersamaan 14 Zulhijjah 1373 berlaku takdir Allah Taala keatas hamba-hambanya yaitu Haji Sulong bersama-sama Wan Othman Ahmad, Encik Ishak Yusof dan Ahmad Haji Sulong hadir ke Senggora karena di panggil oleh pemerintah Siam. Ahmad Haji Sulong ialah anak beliau yang turut sama sebagai juru bahasa karena mereka bertiga tidak fasih berbahasa Siam. Dari tarikh tersebut hilanglah Haji Sulong bersama-sama rekannya. Terdapat berbagai-bagai cerita dikaitkan dengan kehilangan Haji Sulong dan rekan-rekannya. Apa yang pasti ialah kehilangan Haji Sulong tetap menjadi tanda Tanya (Zaman, 1996: 28).

6.2 Perjuangan Rakyat Setelah Haji Sulong Wafat

Tahun 1954, perjuangan umat Melayu Patani menemui kemerosotan berikutan dengan kematian pemimpinnya yang terkemuka, Tengku Mahmud Mahyiddin dan pembunuhan kejam keatas tuan Guru Haji Sulong dan para pengikutnya. Turut sama menjadi mangsa pembunuhan yang tidak berpri kemanusiaan itu ialah anak Haji Sulong bernama Muhammad, Haji Wan Muhammad Amin, Haji Wan Osman Wan Ahmad dan Lebai Ishak Abbas.

Pada tahun 1957 muncul pergerakan sulit, yaitu gerakan bawah tanah (Gerilya) yang dipimpin oleh pejuang Melayu Patani yang tidak berhenti mendesak Kementerian Dalam Negeri menubuhkan sebuah Universitas Melayu bertempat di Wilayah-wilayah Selatan Thai. Mereka juga mendesak supaya menukarkan para pegawai pentadbir Thai yang bukan beragama Islam. Akhirnya pergerakan ini mendesak supaya setiap tahun mesti dikosongkan sekurang-kurangnya 10 tempat bagi pelajar Islam memasuki Akademik Polisi dan Tentara, menerusi satu ujian yang bersaing di bawah sistem kuota khas. Tuntutan paling baru ini dibuat setelah melihat kejayaan orang-orang Melayu umat Islam di Malaya yang telah mendapatkan kemerdekaan mereka pada 13 Agustus serta menggagalkan hasrat orang-orang Melayu Patani untuk bersama-sama menikmati kemerdekaan menerusi percantuman (Zamberi, 1993: 224).

Pada September 1957, panglima Sarit Thannarat telah melakukan rampasan kuasa terhadap kerajaan Phibun Songkram dengan alasan kerajaan Phibun Sudah hilang kepercayaan rakyat dan tidak lagi mampu menjaga keselamatan dan keamanan Negara, dengan rampasan kuasa itu, perlembagaan Negara, dewan perlemen, dan partai politik telah di bubarkan. Sarit melantikkan dirinya menjadi perdana menteri yang mempunyai kuasa penuh untuk menentukan arah politik Negara. Ini karena tentara menyokongnya secara langsung. Pada saat kenaikan Sarit Thannarat, politik Negara berada dalam keadaan yang tidak setabil, Keamanan Negara terancam. Masyarakat Melayu Patani di Selatan sedang giat bergerak menentang politik kerajaan Thai. Suasana politik dan keadaan yang terjadi ini menyebabkan Sarit meningkatkan usaha dan

menumpukan kepada politik perpaduan nasional dengan mengambil institusi monarki sebagai simbol perpaduan (Chapakia 2002 :131).

Dalam usaha mengasimilasikan masyarakat Islam di Selatan, pondok menjadi sasaran utama karena pondok dipandang sebagai pusat agama dan institusi pendidikan penting yang memainkan peranan melahirkan dan menghidupkan ciri budaya tersendiri yang berbeda dari pada budaya Negara. Mengawasi pondok berarti mengawasi kubu budaya masyarakat Melayu. Keadaan ini akan memberi kesan yang besar pada watak keperibadian dan kehidupan mereka.

Memandang pentingnya dasar menguasai pondok, maka pada 1959 di bentuk ahli jabatan kuasa pembangunan pendidikan. Walaupun pada dasarnya akta itu tidak di paksa, tetapi dalam pelaksanaannya telah memaksa pendaftaran pondok berkenaan. Suasana politik pada ketika itu memaksa To' Guru mendaftarkan segera pondoknya dengan kerajaan. Oleh itu untuk membolehkan mereka meneruskan pengajian, mereka terpaksa mendaftarkan pondok mereka.

Memandang kedudukan wilayah di sempadan Selatan berjauhan dari pusat pemerintah di Bangkok serta mempunyai masalah tersendiri yang mengakibatkan sering timbulnya masalah kelancaran pentadbiran, pada 2 Juni 1964 kerajaan mengambil langkah membentuk pusat penyelarasan pemerintahan ialah:

1. Memberi penerangan untuk mewujudkan persepahaman dan mendapatkan kepercayaan di kalangan masyarakat di wilayah sempadan selatan.
2. Menjalankan orientasi terhadap para pegawai kerajaan di setiap peringkat dan di setiap jabatan kemeterian yang terlebih dalam melaksanakan tugas di wilayah sempadan selatan.
3. Melaksanakan kerja khusus yang dirancang oleh jabatan pemerintahan, kementerian dalam negeri.

Pusat menyelaraskan ini dianggap sebagai unit pemerintahan yang terpenting untuk mengawal dan memerintah masyarakat Islam di Selatan. Dengan tumbuhnya pusat ini, pengawasan terhadap kedudukan dan pergerakan masyarakat Melayu adalah lebih mudah dan berkesan (Chapakia, 2002: 132).

Tahun 1957, kekuasaan Thailand berada ditangan kekuasaan tentera yang dipimpin oleh Sarit Thanarat, beliau telah merancang dan melaksanakan politik asimilasi secara paksa terhadap masyarakat Melayu di Thailand Selatan, masyarakat Melayu Patani pada ketika itu tidak berdaya dan tidak ada kesempatan untuk berbantah dan menahan tekanan politik itu. Maka atas dasar kekerasan dan paksaan itulah para pemimpin dan para ulama Patani tidak berani untuk menampil bergerak seperti mana tokoh-tokoh yang sebelumnya seperti Haji Sulong, Tengku Mahmud Mahyiddin dan sebagainya. Keadaan seperti ini terpaksa masyarakat Melayu Patani yang dipimpin oleh para ulama, tokoh politik dan cendekiawan bergerak dan berperan secara illegal (Chapakia, 2002: 138).

Sejak awal tahun 1960-an pemimpin masyarakat Patani yang terdiri tokoh politik, bangsawan dan ulama telah sepakat untuk bergerak dan berperan membentuk organisasi perjuangan yang bertujuan menentang kerajaan Thai. Gerakan itu yang beroperasi di daerah Patani Raya terdapat 3 organisasi yang utama. Sementara mereka sama-sama mengejar tujuan akhirnya yang sama, yakni pemerintahan sendiri, malah dari segi orientasi, ideologis, taktik dan lingkup operasi ada beberapa perbezaan, tergantung kepada latar belakang dan komposisi pemimpin serta keanggotaannya. Adapun organisasi itu ialah Barisan Revolusi Nasional (BRN), Patani United Liberation organization (PULO), Barisan Nasional Pembebasan Patani (BNPP).

6.2.1 Barisan Revolusi Nasional (BRN)

Tengah-tengah masyarakat Patani sedang menghadapi dengan beberapa kebijakan dan pelaksanaan kebijakan Sarif Thanarat. Pada 13 Maret 1960, para pemimpin Patani yang terdiri dari beberapa kalangan baik itu dari tokoh politik, tokoh ulama dan bangsawan mengambil langkah untuk menumbuhkan sebuah organisasi perjuangan yang dinamakan Barisan Revolusi Nasional (BRN) (Fathy, 1994: 126). Antara mereka yang sebagai pengasas adalah, Ustaz Karim Hasan, Muhammad Amin, Tuan Guru Haji Yusuf Capakiya dan Tengku Abdul Jalal. BRN adalah salah satu organisasi politik yang berjuang menuntut kemerdekaan dengan cara Revolusi bersenjata (Chapakia, 2002: 139). BRN merupakan

organisasi pertama setelah dua orang tokoh terkenal (Haji Sulong, Tengku Mahmud Mahyiddin) meninggal dunia, maka BRN mendapat dukungan dan partisipasi yang sangat banyak dari masyarakat. Dalam masa singkat BRN bias berkembang dan berkuasa hampir seluruh daerah dalam empat wilayah Selatan Thai dan khususnya bagi generasi-generasi muda.

Tujuan Barisan Revolusi Nasional (BRN) ialah untuk mempersatukan kumpulan pejuang yang ada supaya menjadi sebuah pertumbuhan yang satu untuk sama-sama meraih dan usaha untuk sampai cita-cita yang dicita-citakan yaitu kemerdekaan Patani (Fathy,2001: 126).

6.2.2 Patani United Liberation Organization (PULO)

Sekian banyak organisasi yang berada di Selatan Thai. BRN yang kita sudah bicarakan diatas dan merupakan organisasi tertua di masyarakat Patani, namun BRN tidak selamanya utuh dan bisa bersatu. BRN mengalami perpecahan di kalangan para pemimpin yang berlainan ideologi.

Pada tahun 1968, Patani United Liberation Organization (PULO) dibentuk, PULO dianggap oleh masyarakat Patani merupakan organisasi yang mengordinasikan banyak kelompok gerilya untuk memerangi pemerintah Thai. PULO dianggap lebih praktis, senjata lebih meluaskan dan imbauannya kepada semua pihak/unsure dalam masyarakat Patani (Pitsuwan,1989: 179).

Patani United Liberation Organization (PULO), Tengku Bira dan teman-temannya berusaha membangun dengan organisasi yang bernama dengan bahasa Inggris, sebagai usaha pendekatan kearah antara bangsa. Penumbuhan PULO akan memperjuangkan dengan perjuangan yang berlandaskan kepada empat prinsip, yaitu: Agama, Bangsa, Tanah air dan prikemanusiaan. Yang mana prinsip prikemanusiaan merupakan prinsip penting sebagai reaksi dan sebagai prinsip dasar pertumbuhan bangsa-bangsa bersatu (Chapakia, 2002 :141). Dengan peranan yang aktif ini, PULO dengan waktu yang singkat berkembang dan berjaya mendapatkan dukungan yang kuat baik itu dari dalam maupun luar negeri. PULO dipimpin oleh para cendikiawan muda yang kelulusannya dari berbagai

Universitas dan berbagai perguruan tinggi baik itu di Timur Tengah maupun di Asia Tenggara.

6.2.3 Barisan Nasional Pembebasan Patani (BNPP)

Setelah organisasi yang pertama di Patani tidak bisa bersatu hingga terusnya dan ada retakan pihak atasan, maka dengan perpecahan BRN itulah munculnya BNPP. Bagi mereka yang tidak setuju dengan pemahaman ideologi Ustaz Karim, mereka itu membangun sebuah organisasi baru yang bernama Barisan Nasional Pembebasan Patani (BNPP).

BNPP sebagai wadah perjuangan yang kumpulannya kebanyakan yang memisahkan diri dari BRN atas dasar perbedaan ideologi. BNPP didirikan pada tanggal 20 Mei 1972 di Malaysia, BNPP di pimpin oleh beberapa orang terkemuka diantaranya: Idris Pakyeh, Cekgu Umar, Tengku Abdul Jalal. Markas besarnya terletak di kawasan bukit besar Budur di wilayah Naratiwat (Fathy, 1994: 130).

BNPP mendapat dukungan kuat dari pada kalangan elit, guru agama dan kalangan intelektual, serta mendapatkan dukungan moral secara meluas dari pada masyarakat Patani pada umumnya. Perjuangan BNPP berdasarkan pendekatan kearah kebangsaan Melayu dan Islam, maka dengan itulah BNPP mendapatkan dukungan yang cukup banyak. Tujuan perjuangan BNPP ialah:

1. Menuntut kemerdekaan hak bangsa Melayu Patani, yaitu tanah air, agama Islam, bahasa, kebudayaan dan kedaulatan pemerintahan Melayu Patani.
2. Berusaha menyatukan pejuang-pejuang Patani supaya berada dibawah satu puncak pimpinan.
3. Mewujudkan sebuah Negara dan masyarakat yang didalamnya nilai-nilai kehidupan yang Islami dan hukum yang menuju Mardhotillah.
4. Mengorganisasikan kekuatan rakyat kearah perjuangan yang tersusun.
5. Menjadi suara rakyat Patani keperingkat internasional.

6. Menegakkan konsep hidup bersama dengan Negara lain dan menjunjung tinggi piagam bangsa-bangsa bersatu (Chapakia, 2002: 142).

Demikian, selain daripada organisasi yang sebut diatas masih ada beberapa organisasi yang bergerak dan berperan di Patani dan diantara organisasi inilah yang membawa dan berjuang untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat Patani yang lebih baik, namun ketiga-tiga inilah yang sangat berperan dan sangat dominant dalam masyarakat Patani, dan selalu mencemaskan oleh pemerintah Thailand.

6.3 Karya-karya Haji Sulong

Selama hidupnya Haji Sulong menjadi sebagai lilin, yang menerangi masyarakat Muslim Patani. Bahkan setelah Haji Sulong meninggal dunia pun, Haji Sulong meninggalkan khazanah (barang milik/ harta benda) yang sangat berharga, bisa kita diketahui hanya, terdapat tiga buah buku karya Haji Sulong yang telah diterbitkan selama ini (tidak termasuk yang belum dicetak). Tiga buah karya ini ialah Khazanah al-Jawahir, Cahaya Islam, dan Gugusan Cahaya Keselamatan.

Buku pertama ialah Khazanah al-Jawahir, sebuah buku mengenai Ushuluddin sementara buku kedua adalah mengenai Maulid Nabi. Tidak banyak keistimewaan pada kedua ini. Kandungannya mengulangi perkara-perkara biasa dalam bidang Ushuluddin dan Sirah Rasul, kecuali tentunya dengan perbedaan dari segi penyusunan dan pengolahan karangan. Bukunya yang paling terkenal dan yang sangat dicari-cari ialah buku ketiga: Gugusan Cahaya Keselamatan. Buku ini menjadi masyhur atau sangat tertarik, oleh karena nilai-nilai sejarah yang dikandungannya; pertama, karena Haji Sulong ditulis sewaktu dalam tahanan (penjara) di Ligor. Ketika menunggu rayuan pembicaraan Mahkamah Besar Bangkok (San Utun) bagi kasus penahanannya dan kedua, karena buku ini diterbitkan oleh anaknya, Haji. Muhm. Amin pada tahun 1958 telah diharamkan oleh pemerintah Thai. Buku-buku yang telah beredar di toko-toko telah ditarik

kembali, sementara sisanya yang sedang dalam proses percetakan di Saudara Press Patani telah dimusnahkan.

Menurut keterangan, Kyai atau Tok guru Patani yang diketahui ahli dalam bidang tafsir kebanyakan merupakan murid-murid Haji Sulong. Beberapa diantaranya, Haji Mustafa bin Haji Abdul Rashid (kampung Bandar Patani), Haji Abdul Kadir Wamud (Nad Tanjung), Haji Hasan Mak Enggol, Haji Muhammad Nor Chenak, Haji Muhammad Pauh (Bendang Jelapang), dan Haji Abdul Rahman Padang Ru (Jaha) (Che' Daud, 1988: 358).

Buku Gugusan Cahaya Keselamatan mengandungi lima bab dan bab akhir sekali adalah khatimah atau Penutup:-

Bab Pertama: Kenyataan ayat Qur'an dan do'a yang berhabit dengan minta lepas daripada seteru dan bala.

Bab Kedua: Kenyataan khasiat Surat al-Waqiah serta do'a dan lain-lain yang berhabit dengan minta murah rezeki dan kaya dan menghilangkan papa.

Bab Ketiga: Kenyataan aturan sembahyang hajat dan do'a menunaikan hajat.

Bab Keempat: Kenyataan hendak ketahui pekerjaan yang akan dibuat baik atau tidak dengan jalan istikharah.

Bab Kelima: Kenyataan berbagai do'a dan wirid yang bertaburan yang lain-lain tujuan dan khasiat.

Khatimah: Kenyataan wirid yang sangat berkat dunia dan akhirat bagi wali Allah yang besar Habib Abdullah al-Haddad dan ratib baginya.

Paling menarik sekali dalam buku ini, dan yang dipercayai menjadi sebab bagi keharumannya ialah "Muqaddimah" penulisannya yang menceritakan latar belakang penangkapannya di Patani pada 16 Januari 1948 sehingga Haji Sulong dibawa ke Ligor karena "bimbang takut jadi kekacauan kalau saya duduk di dalam penjara Patani ini". Selain dari itu, muqaddimah yang agak panjang ini juga, yaitu dari halaman 1 hingga halaman 15, turut memuat senarai tuntutan rakyat Patani (Tuntutan 7 perkara) kepada kerajaan Siam sebagaimana yang dipersetujui pada pertemuan ulama' dan pemuka masyarakat Patani pada 1 April 1947 dulu.

Akhirnya, rasanya perlu dicatat disini maksud penulisan buku ini menurut penulisnya: “supaya boleh jadi petaruhan bagi diri saya sendiri serta mencadangkan kepada anak-anak saya dan zuriah saya boleh beramal wirid dan do’a yang dibentangkan di dalam buku ini, maka minta Allah SWT. memberi taufiq kepada saya dan kepada anak-anak saya dan zuriah saya dan Muslimin semuanya untuk meamalkan amalan yang ada dalam buku ini dengan berkekalan selama-lamanya supaya boleh menjadikan sebagai bekal hidup di dunia sampai akhirat nanti” (Che’ Daud, 1988: 361).



BAB 7. PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Latar belakang Perjuangan Haji Sulong dalam Memperjuangkan Otonomi Khusus Patani disebabkan karena, Pertama, adanya perbedaan agama, tradisi dan nasionalisme yang sangat jauh berbeda dengan keadaan masyarakat Melayu Patani dan yang kedua, adanya kebijaksanaan pemerintah Thai yang mendiskriminasikan masyarakat Melayu Patani di Thailand Selatan baik di bidang Ekonomi, Politik, Hukum maupun di bidang Sosial Budaya. Tengah-tengah masyarakat Patani sedang mengalami konflik dengan pemerintah Thai, maka dianugrah oleh Ilahi seorang tokoh yang bernama Haji Sulong.

Usaha-usaha Perjuangan Haji Sulong dalam memperjuangkan Otonomi Khusus Patani dalam menghadapi dasar kebudayaan (*ThaiRathaniyum*) yang diciptakan oleh Perdana Menteri Phibul Songgram. Metode perjuangan yang dilakukan oleh Haji Sulong adalah untuk mendapatkan Otonomi Khusus yang bisa mempertahankan identitas dan kebudayaan Melayu dengan ciri khasnya serta agama Islam sebagai agama bangsanya sendiri dari pemerintah Thai dan ini dikenal dengan Tujuh Tuntutan Haji Sulong. Tujuh pasal ini isinya, bertujuan untuk mendapatkan sebuah daerah yang memiliki otonomi khusus bagi seluruh rakyat Patani di Thailand Selatan, dan bukan untuk mendirikan sebuah Negara yang merdeka, karena negeri Patani sudah menjadi sebuah daerah integrasi Thailand dan untuk melepaskan diri dari cengkraman kerajaan Thai sangatlah sulit.

Hasil Perjuangan Haji Sulong dalam memperjuangkan Otonomi Khusus Patani melalui Tuntutan 7 perkara tidak berhasil sehingga sampai saat Haji Sulong meninggal dunia, dengan kematian Haji Sulong itu, sangat luar biasa sekali sehingga menjadikan satu peristiwa yang sangat mengerikan bagi masyarakat Melayu Patani, dan setelah Haji Sulong meninggalkan dunia, maka bangkitlah beberpa organisasi pembebasan Melayu Patani, dari sekian banyaknya organisasi yang berperan di Masyarakat Patani, namun yang paling dominan diantara

organisasi itu hanya ada 3 organisasi, dan ketiga-tiga organisasi itu selalu dipikirkan oleh pemerintah Thai, bahwa ketiga organisasi ini akan membentuk gerakan-gerakan, menentang pemerintahan Thai untuk mendapat hak kebebasan dan keadilan sepertimana yang diperjuangkan oleh Haji Sulong. Adapun ketiga organisasi itu adalah: Barisan Revolusi Nasional (BRN), Patani United Liberation Organization (PULO), Barisan Nasional Pembebasan Patani (BNPP).

7.2 Saran

1. Penulis menyarankan kepada masyarakat umum dan pemuda-pemudi untuk lebih memperhatikan ilmu-ilmu sejarah khususnya sejarah Patani.
2. Masih banyak sejarah Patani yang belum diteliti oleh masyarakat dan penulis menyarankan kepada mahasiswa selanjutnya khususnya mahasiswa dari Patani untuk mengkaji sejarah Patani yang sudah lama lenyap dan membangkitkan kembali semangat pemuda-pemudi Patani.
3. Buku-buku atau karya-karya tentang sejarah Patani sangat kurang, maka penulis sarankan kepada mahasiswa dan para pemuda-pemudi Muslim Patani perlu mencarikan sejarah para tokoh-tokoh Patani untuk mengkaji dan meneliti lebih mendalam supaya menambah ilmu sejarah kepada masyarakat khususnya masyarakat Patani.
4. Penulis skripsi ini memang jauh dari kesempurnaan dan kelengkapan, karena keterbatasan bahasa yang dimiliki penulis sehingga penulis dari skripsi ini memintak sanan dan Kritik yang membangun untuk Penulis kedepan, dengan demikian akan ada perbaikan- perbaikan dalam diri penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, T dan Siddique, S. 1988. *Tradisi Dan Kebangkitan Islam Di Asia Tenggara*. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.
- Bashah, A.H.1994. *Raja Campa Dinasti Jembal Dalam Patani Besar*. Kelantan: Pustaka Reka.
- Chapakia, A.O. 2002. *Politik dan Perjuangan Masyarakat Patani Selatan Thailand 1902-1922*. Malaysia: University Kebangsaan Malaysia Bangi.
- Che'daud, I. 1988. *Tokoh-tokoh Ulama Semenanjung Malayu*. Kota Baharu: Majlis Agama dan adat Istiadat Melayu Kelantan.
- Duveger, M. 1982. *Sosiologi politik*. Jakarta: TP Raja Grafindo Persada.
- Fathy, A. 1994. *Pengantar Sejarah Patani*. Alor Star : Pustaka Darussalam.
- Fathy, A. 2001a. *Ulama Besar Dari Patani*. Malaysia: University Kebangsaan Malaysia.
- Fathy, A. 2001b. *Pengantar Sejarah Patani*. Kelantan: Aman Peris
- Gottschalk, L. 1986. *Mengerti Sejarah. Terjemahan*. oleh Nugroho Notosusanto. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.
- Hasbullah, M. 2003. *Asia Tenggara Konsentrasi Baru Kebangkitan Islam*. Bandung: Fokusmedia.
- Mahmud, N.A. 2006. *Sejarah Perjuangan Melayu Patani 1785-1945*. Malaysia: University Kebangsaan Malaysia Bangi.
- Malek, M.Z. 1993. *Umat Islam Patani Sejarah dan Politik*. Malaysia: Hisbi Shah Alam.
- Malek, M.Z. 1999. *Harimau Malaya Biografi Tengku Mahmud Mahyiddee*. Malaysia: University Kebangsaan Malaysia Bangi.
- Mujani, W.K. 2002. *Minoriti Muslim*. Malaysia: Syarikat Percetakan Putrajaya SDN, BHD.

- Muzani, S. 1993. *Pembangunan dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.
- Nasikun. 1987. *Sosiologi Politik*. Yogyakarta: PAU-Sosial UGM.
- Nurdi, H. 2010. *Perjuangan Muslim Patani Sejarah Perjuang penindasan dan Cita-cita Perdamaian*. Kuala Lumpur: Alam Raya Enterprise SDN BHD.
- Pitsuwan, S. 1989. *Islam di Muangthai Nasionalisme Melayu Masyarakat Patani*. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.
- Sjamsuddin, H. 2007. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Soekanto, S.1999. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: TP Raja Grafindo Persada.
- Suaedy, A. 2012. *Dinamika Minoritas Muslim Mencari Jalan Damai*. Jakarta: Puslitbag Lektor Dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang Diklat Kementerian Agama RI.
- Syukri, I. 2002. *Sejarah kerajaan Melayu Patani*. Malaysia: University Kebangsaan Malaysia Bangi.
- Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Badan Perbitan Universitas Jember.
- Zaman, M. K. 1996. *Fatani 13 Ogos*. Kelantan: tp.
- Nuh, A. 2004. “*Perjuangan Politik Haji Sulong dalam Pembebasan Masyarakat Patani di Thailand Selatan*”. Tidak diterbitkan. *Skripsi*. Jakarta: Uनेversitas Muhammadiyah Jakarta.
- Tahe, w. 2010. “*Perjuangan Plitik Haji Sulong Di Patani Thailand (1947-1954)*”. Tidak diterbitkan. *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Danger In Patani. 2014. *Mengenal Lebih Dekat Tuan Guru Haji Sulong*. <http://dangerofpatani.blogspot.co.id/2014/09/bab-ii-haji-sulong-tokoh-perjuangan.html>. [01 September 2014].

MATRIK PENELITIAN

Tema Penelitian	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Metode Penelitian	Sifat Penelitian	Rumusan Masalah	Sumber Data
Sejarah Asia Tenggara	Peranan Haji Sulong Dalam Memperjuangkan Patani Thailand Selatan (1947-1954)	Penelitian Sejarah	Metode Penelitian Sejarah dengan langkah-langkah heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi	Kajian Pustaka	1) Apa Yang Melatar Belakangi Perjuangan Haji Sulong Dalam Memperjuangkan Patani Thailand Selatan (1947-1954) ? 2) Bagaimana Usaha-Usaha Haji Sulong Dalam Memperjuangkan Patani Thailand Selatan (1947-1954)? 3) Bagaimana Hasil Perjuang Haji Sulong Dalam Memperjuangkan Patani Thailand Selatan (1947-1954) ?	1. Buku 2. Skripsi 3. Internet

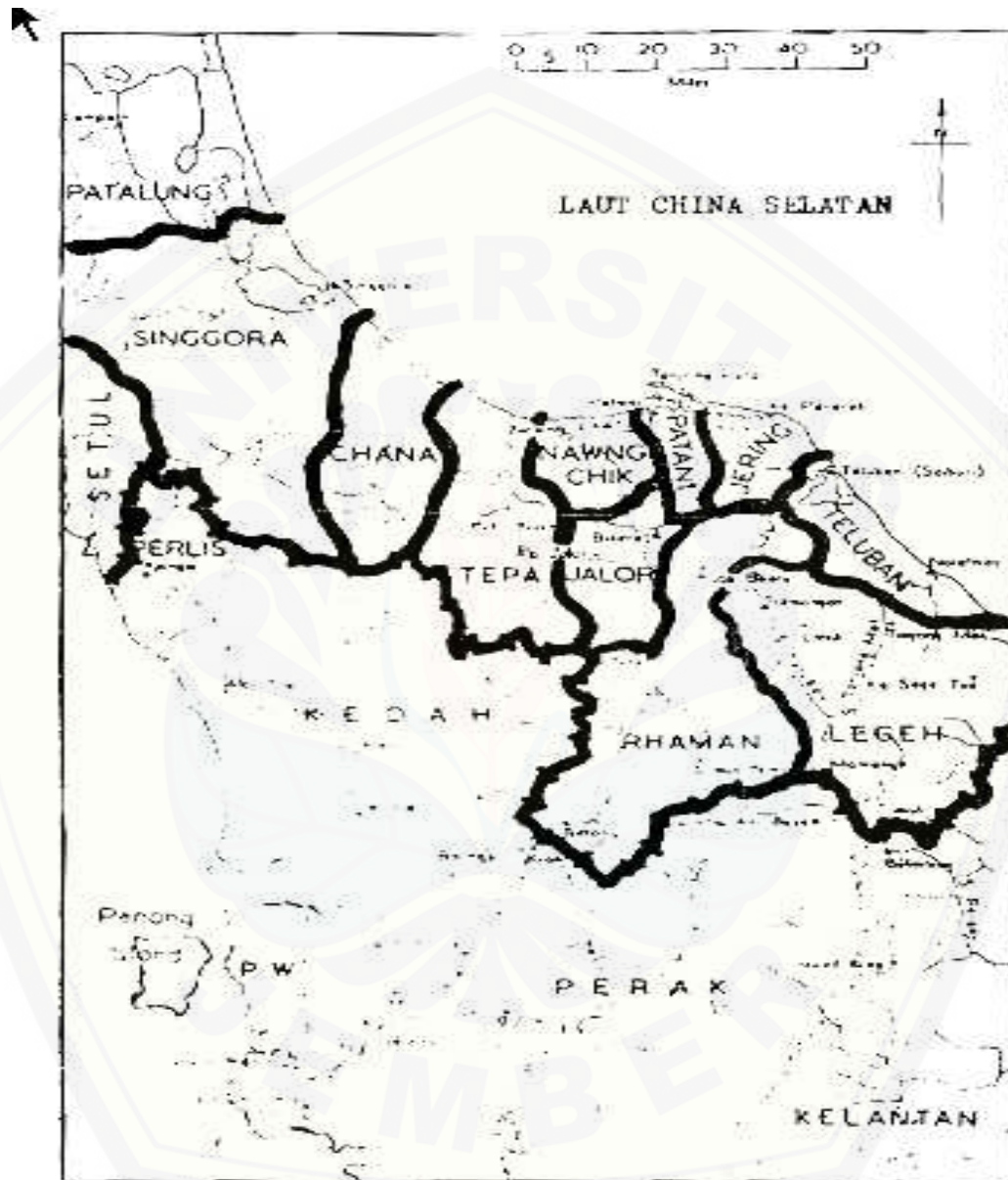
LAMPIRAN B. LAMPIRAN PETA:

LAMPIRAN B1. PETA NEGARA THAILAND



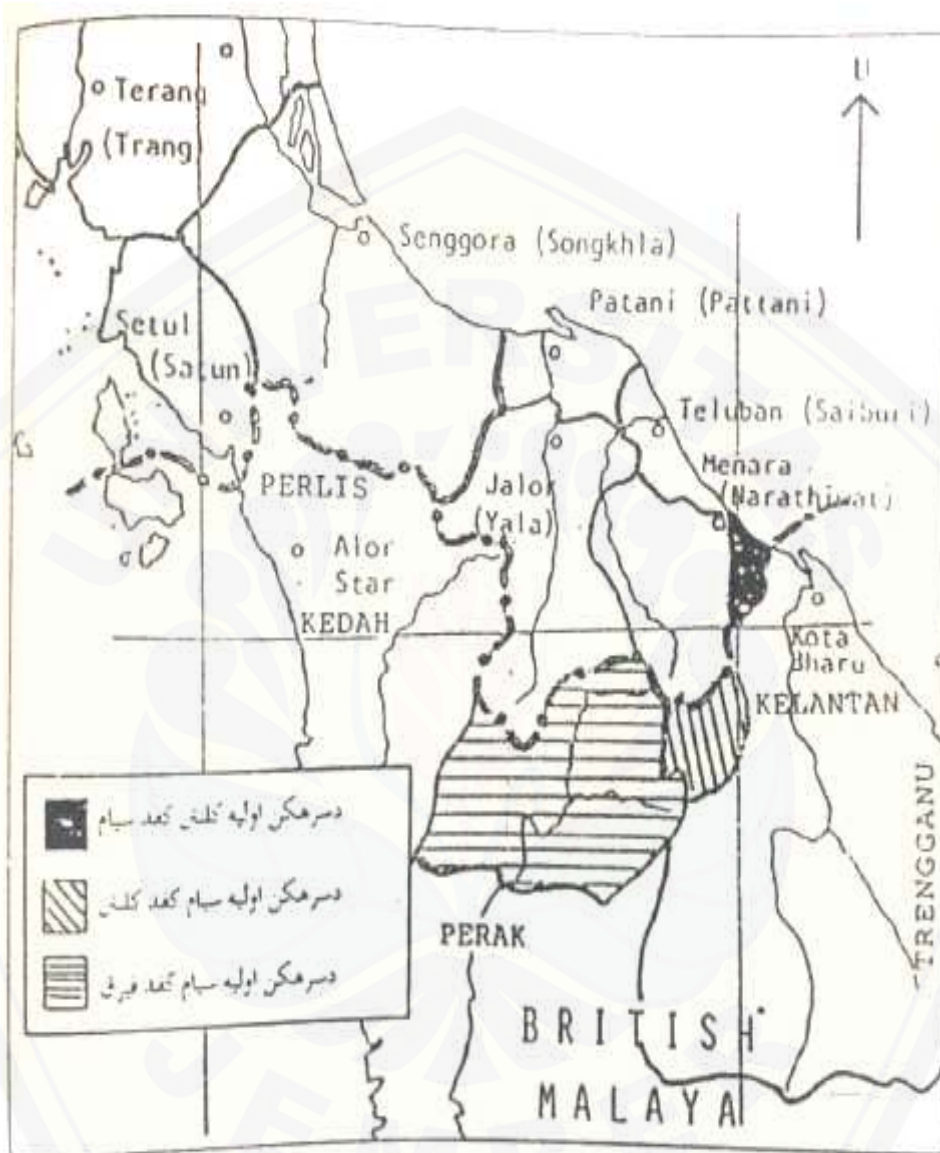
Sumber: Pitsuwan, S. 1989. *Islam di Muangthai Nasionalisme Melayu Masyarakat Patani*. Jakarta: LP3ES.

**LAMPIRAN B2. PETA KERAJAAN PATANI (1816-1902), KERAJAAN
PATANI DIBAGI MENJADI 7 NEGERI KECIL.**



Sumber: Malek, M.Z. 1993. *Umat Islam Patani Sejarah dan Politik*. Malaysia:
Hisbi Shah Alam.

**LAMPIRAN B3. PETA PATANI SETELAH PERJANJIAN ANGLO-SIAM
PADA TAHUN 1909 M.**



Sumber: Chapakia, A.O. 2002. *Politik dan Perjuangan Masyarakat Islam Di Selatan Thailand 1902-2002*. Malaysia: UKM Bangi.

LAMPIRAN C. LAMPIRAN GAMBAR:

LAMPIRAN C1. GAMBAR HAJI SULONG BIN ABDUL KADIR



**Syahid Tuan Guru Haji Sulong Adalah Ulama Yang Berjaya Menyatukan
Dan Membangkitkan Semangat Umat Islam Patani.**

Sumber: Zaman,M.K.1996. *Fatani 13 Ogos. Kelantan: Tp*

LAMPIRAN C2. GAMBAR TENGKU ABDUL KADIR KAMARUDDIN.



Tengku Abdul Kadir Kamaruddin Ibni Al-Marhum Sultan Sulaiman Shariffuddin Syah (1899-1902), Merupakan Raja Melayu Yang Terakhir Memerintah Negeri Patani.

Sumber: Malek, M.Z. 1993. *Umat Islam Patani Sejarah dan Politik*. Malaysia: Hisbi Shah Alam.

**LAMPIRAN C3. GAMBAR TENGGU MAHMUD MUHAIYIDDIN
“HARIMAU MALAYA” MAJER FORE 136.**



Tenggu Mahmud Muhaiyiddin adalah anak bungsu bagi Tengku Abdul Kadir Kamaruddin Raja Melayu Yang Terakhir Memerintah Negeri Patani.

Sumber: Zaman,M.K.1996. *Fatani 13 Ogos*. Kelantan: Tp

LAMPIRAN C4. GAMBAR PIBUN SONGGRAM



**Pibun Songram Adalah Seorang Perdana Menteri Thai Field Marshall
Phibun Songgram, Pentadbirannya (1938-1945) Dan 1947-1957)
Memberikan Tekanan Hebat Terhadap Umat Islam Patani.**

**Sumber: Mahmud, N. A. 2006 Sejarah Perjuangan Melayu Patani 1785-1954.
Malaysia: Ukm Bangi.**

**LAMPIRAN C5. GAMBAR RAJA SIAM “CHULALONGKON(RAMA V)”
DAN PUTERA DAMRONG**



**Rama V Chulalongkon (1868-1910), Telah Menghapuskan Kesultanan Patani
Dan Menjadikan Patani Sebagian Dari Negeri Siam, Beliau Juga Yang
Menerapkan Sistem Thesapiban.**

**Sumber: Malek, M.Z. 1993. *Umat Islam Patani Sejarah dan Politik*. Malaysia:
Hisbi Shah Alam.**

**LAMPIRAN C6. GAMBAR PRIDI PANOMYONG: MENJAJIKAN
KUASA OTONOMI PATANI**



Pridi Panomyong Adalah Perdana Menteri Thai, Pentadbirannya Yang Singkat (Mac-Ogos 1946), Tetapi Banyak Memberikan Keistimewaan Kepada Masyarakat Islam, Bilau Juga Menjajikan Kuasa Otonomi Patani.

Sumber: Zaman,M.K.1996. *Fatani 13 Ogos*. Kelantan: Tp

**LAMPIRAN C7. GAMBAR ENCIK ISHAK BIN YUSOFF, WAN
OTHMAN BIN AHMAD DAN AHMAD: TEWAS BERSAMA
HAJI SULONG.**





*Ahmad
anak Haji Sulong yang turut dibunuh*

Sumber: Zaman,M.K.1996. *Fatani 13 Ogos. Kelantan: Tp*

**LAMPIRAN C8. GAMBAR MADRASAH AL-MAARIF AL-WATANIAH
PATANI YANG DIBANGUNKAH OLEH HAJISULONG.**



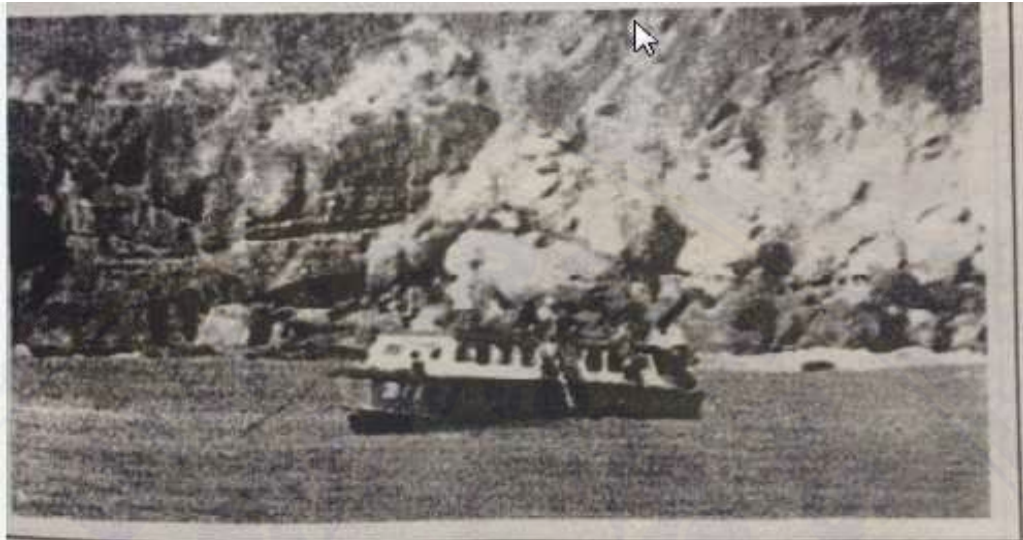
Sumber: Zaman,M.K.1996. *Fatani 13 Ogos. Kelantan: Tp*

LAMPIRAN C9. GAMBAR HAJI MUHAMMAD AMINN



Sumber: Zaman,M.K.1996. *Fatani 13 Ogos. Kelantan: Tp*

**LAMPIRAN C10. GAMBAR SEWAKTU KELUARGANYA MENCARI
MAYAT HAJI SULONG.**



*Tasik Senggora (1957)
mencari mayat Haji Sulong*



*Wan Humidah isteri Ahmad (kiri)
Hajjah Khadijah (tengah)
Zakiah - anak (kanan)
di atas perahu sewaktu mencari mayat Haji Sulong.*



**Pulau Tikus Dilihat Dari Pantai Samila Senggora, Di Sanalah Dipercaya
Haji Sulong Bersama Anaknya Dan Pengikutnya Dibenamkan Ke Dasar
Laut (Di Bunuh.**

Sumber: Zaman, M.K. 1996. *Fatani 13 Ogos. Kelantan: Tp*

**LAMPIRAN C11. GAMBAR HAJI ZAINAL ABIDIN (DEN TOHMEENA),
GAMBAR BANGUNAN MAJLIS AGAMA ISLAM FATHONI**



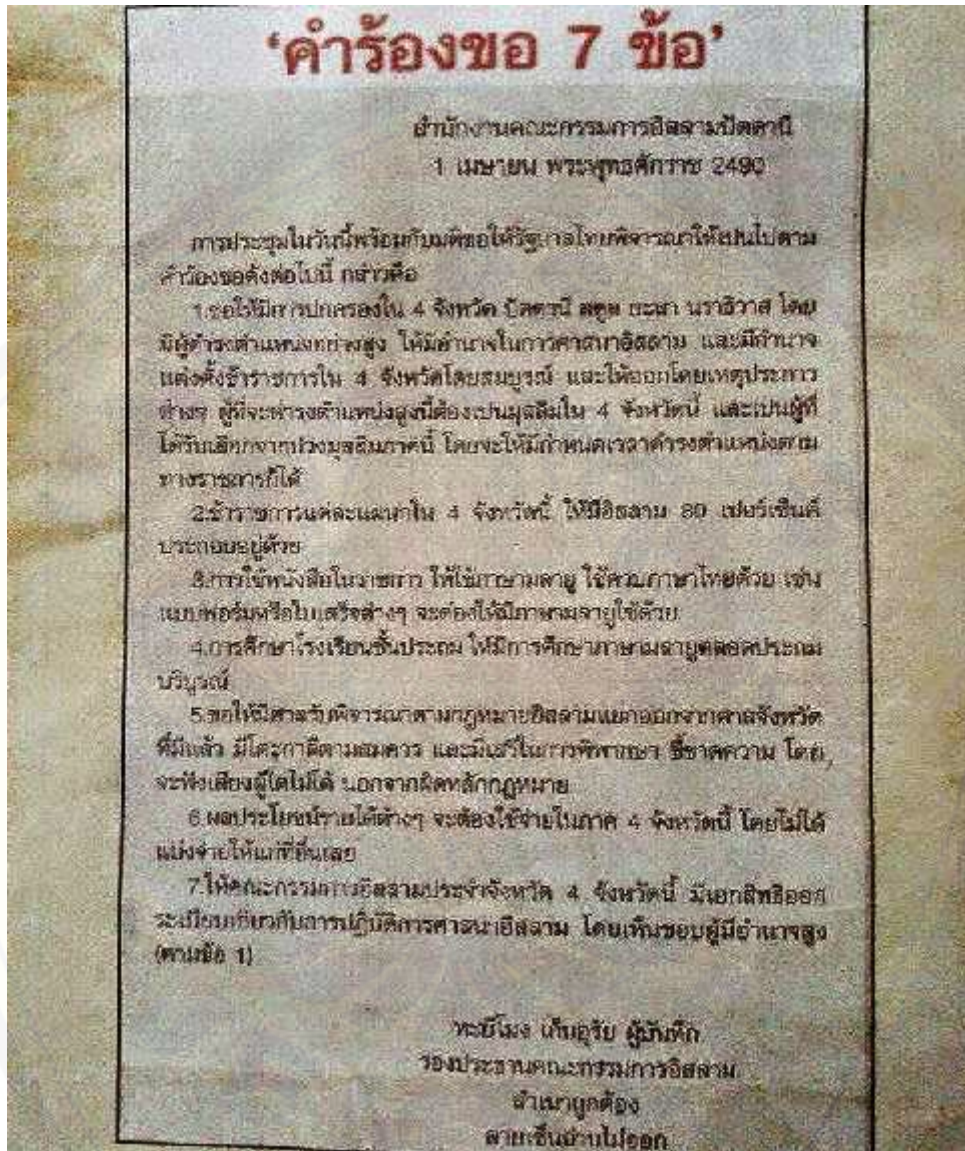
**Haji Zainal Abidin Atau Mana Gelarnya Den Tohmeena Adalah Seorang
Lagi Putranya Haji Sulong.**



Sumber: Zaman,M.K.1996. Fatani 13 Ogos. Kelantan:

LAMPIRAN D. LAMPIRAN DOKUMEN

LAMPIRAN D1. DOKUMEN TUNTUTAN 7 PERKARA DALAM BAHASA THAI.



Sumber: Danger In Patani. 2014. *Mengenal Lebih Dekat Tuan Guru Haji Sulong*.
<http://dangerofpatani.blogspot.co.id/2014/09/bab-ii-haji-sulong-tokoh-perjuangan.html>. [01 September 2014].

LAMPIRAN D2. DOKUMEN SURAT KENYATAAN KEHILANGAN HAJI
SULONG



Sumber: Danger In Patani. 2014. *Mengenal Lebih Dekat Tuan Guru Haji Sulong*.
<http://dangerofpatani.blogspot.co.id/2014/09/bab-ii-haji-sulong-tokoh-perjuangan.html>. [01 September 2014].

LAMPIRAN E. BIODATA PENELITI**BIODATA PENELITI
DAFTAR RIWAYAT HIDUP****A. Identitas**

1. Nama : Husam Lamato
2. Tempat/ Tanggal Lahir : Yala, 10 Agustus 1992
3. Agama : Islam
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Abdullah Lamato
 - b. Ibu : Hamidah Lamato
6. Alamat Asal : 230/1 M.1 T.Klongmai A. Yarang CH. Pattani
7. Alamat Jember : Jl. Argoporo II No. 16, Pemum Semeru.

**B. Pendidikan**

1. TK Pusu Putih Witthaya, Kotarakno, Klongmai, Yarang, Patani : 2000- 2002
2. SD Talad Perigi, Pitumudi, Yarang, Patani : 2002- 2007
3. SMP Al- Islamiyah Witthaya Mullanithi' Kubang buaya, Klongmai, Yarang, Patani : 2007- 2009
4. SMA Al- Islamiyah Witthaya Mullanithi' Kubang buaya, Klongmai, Yarang, Patani : 2009- 2011

C. Pengalaman Organisasi

1. Himpunan Mahasiswa Patani (Selatan Thailand) di Indonesia (HMPI)
 - Tekua Umum : 2013- 2014
 - Tekua Umum : 2014- 2015
 - Anggota : 2015- 2016